

**INTENSITAS KEBIJAKAN “PRO ISRAEL” AMERIKA SERIKAT OLEH
GEORGE W. BUSH PASCA PERISTIWA 11 SEPTEMBER**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan
Internasional Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Peminatan *Social
and Culture Development***

Oleh :

RAISSA ARDIANTI

NIM. 0811240024



PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2012

**INTENSITAS KEBIJAKAN “PRO ISRAEL” AMERIKA SERIKAT OLEH
GEORGE W. BUSH PASCA PERISTIWA 11 SEPTEMBER**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Raissa Ardianti

NIM. 0811240024

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

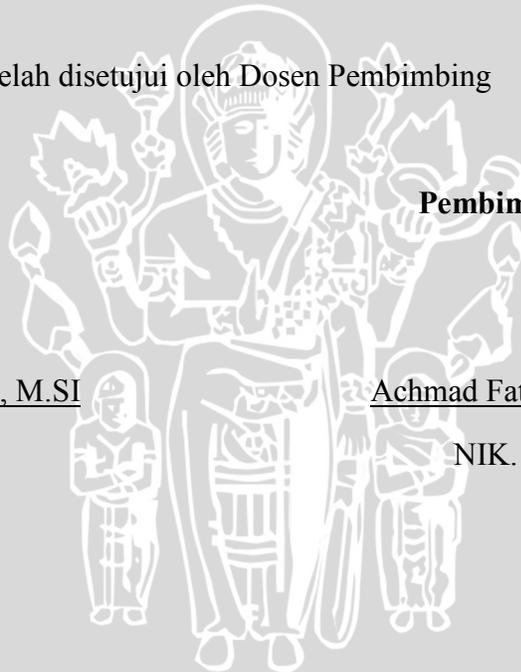
Pembimbing Pendamping

Lia Nihlah Najwah, S.IP, M.SI

NIP. 83052111120023

Achmad Fathoni K., S.IP, M.A

NIK. 82012311110025



**INTENSITAS KEBIJAKAN “PRO ISRAEL” AMERIKA SERIKAT OLEH
GEORGE W. BUSH PASCA PERISTIWA 11 SEPTEMBER**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Raissa Ardianti

NIM. 0811240024

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana

Pada tanggal 28 Juni 2012

Tim Penguji

**Pembimbing Utama
Pendamping**

Pembimbing

Lia Nihlah Najwah, S.IP, M.SI

Achmad Fathoni K., S.IP, M.A

NIP. 8305211112002

NIK. 82012311110025

Tanggal:

Tanggal:

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

Dian Muthmainah, S.IP, M.A
M.SI

Ni Komang Desy, S.IP,

NIP. 197803192005012002

NIK. -

Malang, 25 Juli 2012

Dekan,

Prof. Dr. Ir. H. Darsono Wisadirana, MS

NIP. 195612271983121001

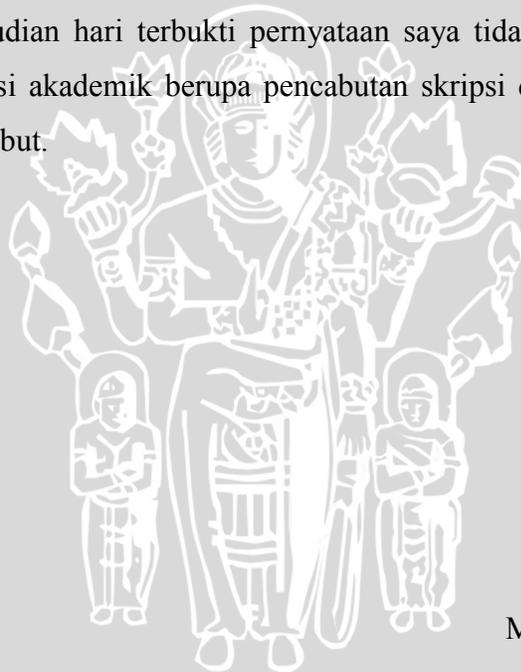
PERNYATAAN

Nama : Raissa Ardianti

NIM : 0811240024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul : INTENSITAS KEBIJAKAN “PRO ISRAEL” AMERIKA SERIKAT OLEH GEORGE W. BUSH PASCA PERISTIWA 11 SEPTEMBER adalah betul – betul karya sendiri. Hal – hal yang bukan merupakan karya saya, dalam skripsi tersebut telah diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia diberikan sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.



Malang, 13 Juni 2012

Yang Membuat Pernyataan

Raissa Ardianti

NIM. 0811240024

INTENSITAS KEBIJAKAN “PRO ISRAEL” AMERIKA SERIKAT OLEH GEORGE W. BUSH PASCA PERISTIWA 11 SEPTEMBER

ABSTRAK

Peristiwa 11 September merupakan titik episentrum dirilisnya kebijakan *War On Terrorism* oleh Amerika Serikat. Kebijakan tersebut berimbas tidak hanya pada manifestasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, namun sekaligus sebagai landasan utama tindakan pemerintah Amerika Serikat dalam memutuskan sebuah kebijakan tertentu. Kebijakan Pro Israel dimana adanya penguatan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dengan Israel menjadi salah satu kebijakan yang manifestasinya mengalami perubahan pasca terjadinya peristiwa 11 September. George W. Bush sebagai presiden yang menjabat saat itu, menjadi obyek penelitian utama karena keputusannya untuk melanjutkan kebijakan Pro Israel. Tindakan dari George W. Bush dalam keberlanjutan kebijakan tersebut ternyata masih dipengaruhi oleh beberapa elemen baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

Secara umum penelitian ini membahas tentang bagaimana seorang individu sebagai *descicion maker* (pembuat keputusan) dipengaruhi oleh lingkungan – lingkungan yang mengakibatkan adanya orientasi tindakan tertentu. Karakteristik kebudayaan strategis suatu bangsa yang dilingkupi oleh keputusan dari seorang individu merupakan salah satu topik bahasan dalam penelitian ini. Peneliti berusaha membuktikan bagaimana Teori Budaya Strategis dapat diaplikasikan dalam ranah kebijakan politik internasional, dengan individu sebagai level analisisnya.

Kata Kunci : Pro Israel, pengaruh individu.

THE INTENSITY OF UNITED STATES' "PRO ISRAEL" POLICY POST SEPTEMBER 11TH INCIDENT BY GEORGE W. BUSH

ABSTRACT

The September 11th incident was the epicentrum reason of War on Terrorism policy publishing in United States of America. The War on Terrorism policy were not only impacting on U.S foreign policies but also becoming the core of all the presidents of United States' major descicions. The Pro Israel Policy which made to react the War on Terrorism policy was aimed to stretghen U.S and Israel's bilateral agreement, however the objects of the policy has changed after September 11th incident. George W. Bush whose power was in charge, triggered to continue the Pro Israel Policy. The sustainability of the Pro Israel Policy by George W. Bush however still be affected by some elements both from the government and non governmental environment.

Generaly this thesis is trying to elaborate how an individual actor as a single descicion maker may be affected by the surrounded environments which cause a certain act orientation. The characteristics of a nation's strategic culture is another object this thesis will elaborate. Researcher will have to testify how the Theory of Strategic Culture works properly for forreign affairs policy studies on invidual level of analysis.

Keywords : Pro Israel, individual actor as a single descicion maker.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Maha Pemilik Segala Ilmu yang telah merestui peneliti untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Intensitas Kebijakan Pro Israel Amerika Serikat Oleh George W. Bush Pasca Peristiwa 11 September”. Penelitian ini ditujukan secara umum sebagai pembuktian kualitas SDM Mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya, dan secara khusus kepada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Ucapan terima kasih dan rasa hormat disampaikan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas restuNYA dalam proses pengerjaan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Darsono Wisadirana, MS selaku Dekan FISIP yang atas kesediannya peneliti belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Ibu Lia Nihlah Najwa, S.IP, M.Si selaku pembimbing utama yang secara demokratis memberikan bimbingan beserta dukungannya selama pengerjaan skripsi berlangsung.
4. Bapak Achmad Fathoni, S.IP. M.A atas kritik, saran, dan bimbingan moralnya yang luar biasa membangun selama sebelum dan saat skripsi ini diajukan.
5. Ibu Dian Muthmainah, S.IP, M.A selaku anggota penguji 1 atas saran dan kritiknya yang sangat membangun.
6. Ibu Ni Komang Desy, S.IP, Msi atas saran, masukan, dan kritiknya yang sangat membantu.
7. Ibu Suci Rahayu dan Bapak Drs. Ibram Yahya, kedua orang tua peneliti yang selalu mendukung minat pendidikan putra putrinya.
8. Rekan – rekan angkatan 2008 Program Studi Hubungan Internasional, utamanya rekan – rekan peminatan *Social And Cultural Development* atas diskusi dan bincang – bincang tema skripsinya yang selalu mencerahkan peneliti.

9. Okto Nuansa Tristy dan Prastika Citra Utami, dua sahabat setia yang selalu memberikan dukungan moril.
10. Teman – teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti mengucapkan banyak permintaan maaf atas sejumlah ketidaksempurnaan skripsi ini sehingga saran dan kritik yang membangun sangat dinantikan. Rasa bangga terhadap peminatan serta Program Studi merupakan salah satu motivasi kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini dan secara khusus mempersembahkannya untuk Program Studi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Peneliti juga berharap agar penelitian ini menjadi salah satu bahan bacaan penunjang wacana gerakan 11 September yang dipandang melalui sudut pandang budaya dalam hubungan internasional.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR ISTILAH ASING.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	17
1.2 Rumusan Masalah	22
1.3 Tujuan
1.3.1 Tujuan Umum.....	22
1.3.2 Tujuan Khusus.....	22
1.4 Manfaat	25
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Studi Terdahulu.....	26

2.2 Kerangka Teori	
2.2.1 Definisi Umum Teori Budaya Strategis.....	33
2.2.2 Tiga Arus Teori Budaya Strategis.....	35
2.2.3 Penggunaan Variabel Teori Budaya Strategis.....	37
2.3 Operasionalisasi Teori.....	38
2.3.1 Causal Judgement.....	41
2.3.2 Cognitive Mapping.....	42
2.3.3 Symbol Analysis.....	43
2.5 Hipotesis.....	44

BAB III : METODOLOGI

3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	46
3.3 Teknik Pencarian Data.....	47
3.4 Peringkat Analisis.....	48
3.5 Sistematika Penulisan.....	51

BAB IV : INTENSITAS KEBIJAKAN PRO ISRAEL AMERIKA SERIKAT OLEH GEORGE W. BUSH PASCA PERISTIWA 11 SEPTEMBER

4.1 Pengaruh Peristiwa 11 September Terhadap Intensitas Kebijakan Pro Israel.....	53
4.1.1 Kebijakan Pro Israel Sebelum Peristiwa 11 September.....	54
4.1.2 Kebijakan Pro Israel Sesudah Peristiwa 11 September.....	56
4.2 Dominasi Peran George W. Bush Dalam Kebijakan Pro Israel.....	62
4.3 Pengaruh Penasihat George W. Bush Terhadap Kebijakan Pro Israel....	65

4.4 Analisis Simbolik Perilaku George W. Bush.....69

4.5 Generalisasi Analisis.....73

4.6 Keberlangsungan Kebijakan Pro Israel
Pada Masa Pemerintahan Obama.....77

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan.....80

V.2 Saran.....83

DAFTAR PUSTAKA.....85

LAMPIRAN

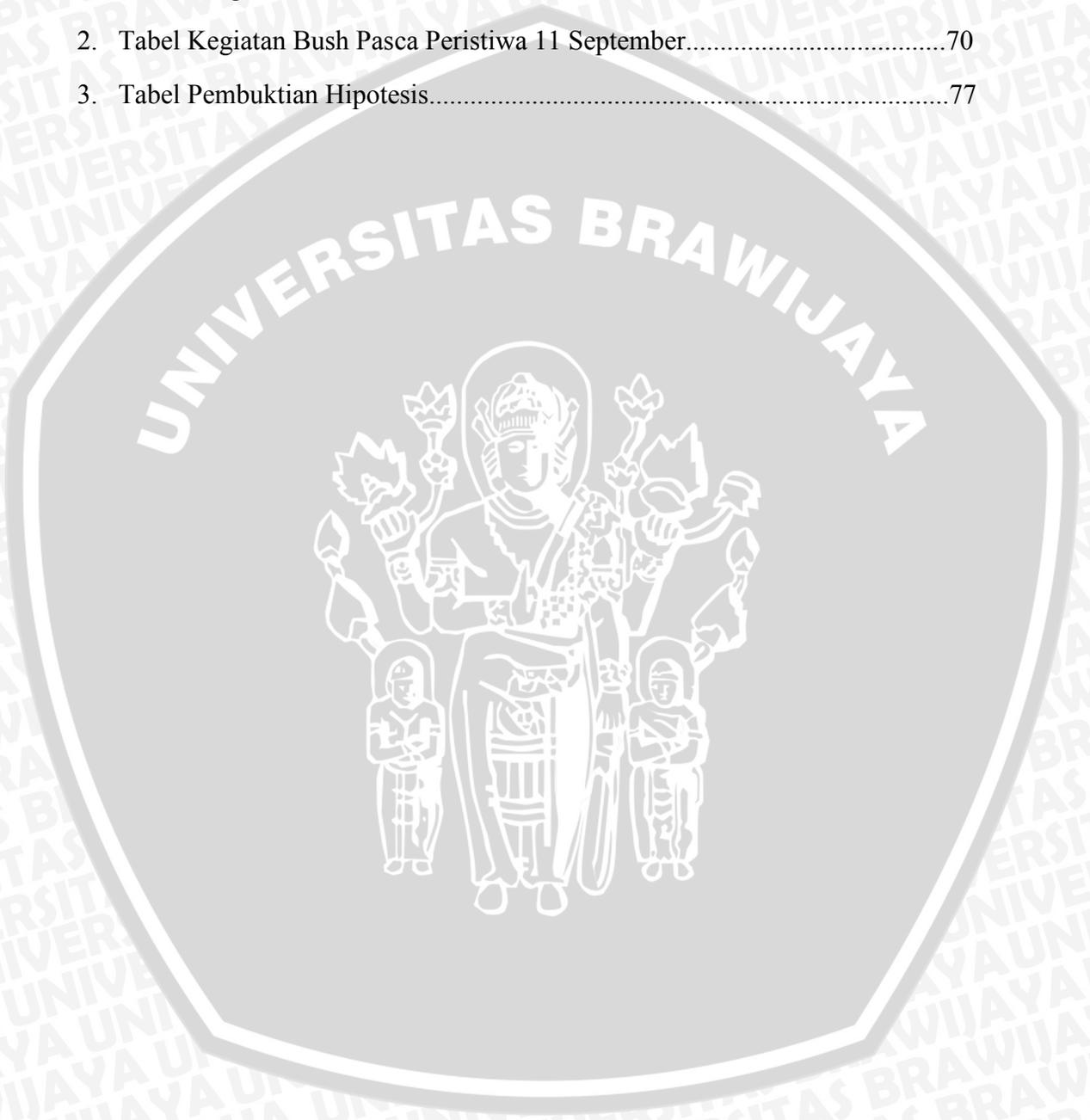


DAFTAR TABEL

1. Perbandingan Penelitian32

2. Tabel Kegiatan Bush Pasca Peristiwa 11 September.....70

3. Tabel Pembuktian Hipotesis.....77



DAFTAR GAMBAR

1. Skema Operasionalisasi Teori.....39



DAFTAR SINGKATAN

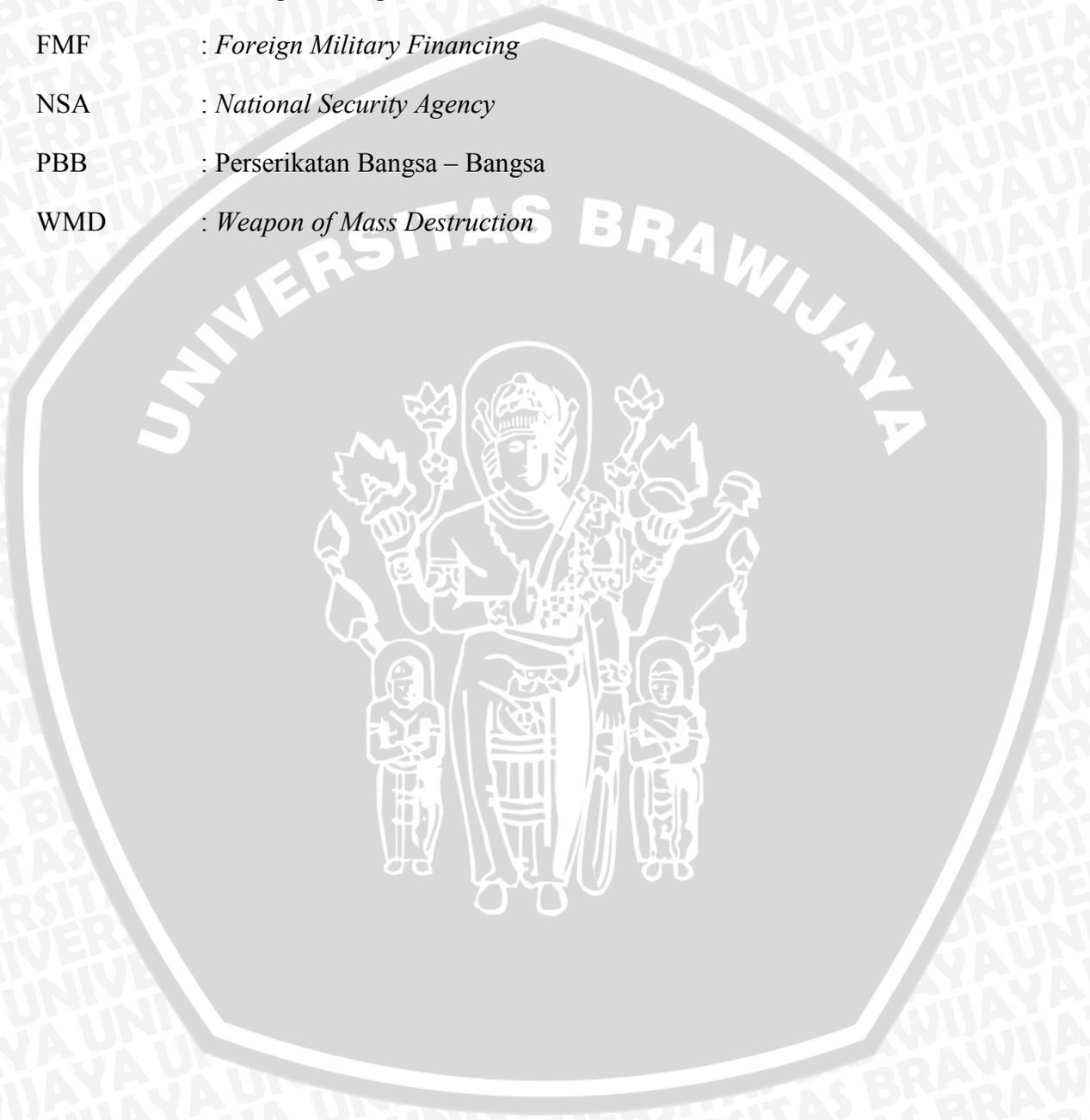
FISA : *Foreign Intelligence Survellaince Act*

FMF : *Foreign Military Financing*

NSA : *National Security Agency*

PBB : *Perserikatan Bangsa – Bangsa*

WMD : *Weapon of Mass Destruction*



DAFTAR ISTILAH ASING

<i>Descicion Maker</i>	: Pembuat keputusan
<i>Five Pillars of Wisdom</i>	: Lima pilar kebijaksanaan
<i>Freedom</i>	: Kebebasan
<i>Seal of The President of The United States</i>	: Keputusan resmi Presiden Amerika
Serikat	
<i>Security Threat</i>	: Ancaman keamanan
<i>Theories of Strategic Culture</i>	: Teori Budaya Strategis
<i>War on Terrorism</i>	: Perang melawan terorisme
<i>Weapon of Mass Destruction</i>	: Senjata pemusnah massal



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Bimbingan Skripsi
2. Curriculum Vita



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan terlegitimasi yang menandai hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Israel mulai terlihat pada masa pemerintahan Presiden Herbert Bush. Pada masa pemerintahan Presiden Herbert Bush hubungan diplomatik Amerika Serikat terhadap Timur Tengah ditandai dengan *Five Pillars of Wisdom* atau Lima Pilar Kebijaksanaan yang digagas oleh kabinet Presiden Herbert Bush untuk melandasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah, terutama tentang hubungan Amerika Serikat terhadap konflik Arab – Israel. Lima Pilar Kebijaksanaan tersebut berisi tentang demokrasi, pembangunan ekonomi, pengawasan persenjataan, keamanan wilayah teluk, dan akomodasi konflik Arab – Israel.¹ Pada pilar kebijaksanaan yang kelima tentang akomodasi konflik Arab – Israel, President Herbert Bush menandai keterlibatan Amerika Serikat dalam proses perdamaian dalam perjanjian Madrid pada tahun 1991, dengan basis konferensi PBB nomor 242 dan 338 yang secara umum berisi tentang prinsip – prinsip pembagian wilayah negara secara damai.² Dalam negosiasi tersebut Israel dan Palestina hadir untuk saling mengemukakan kepentingan masing – masing terhadap wilayah Gaza. Pada masa tersebut, posisi hubungan Amerika Serikat dinyatakan netral akibat

¹ Shlaim, Avi. *The US and the Israeli – Palestinian Conflict dalam Dunne, Tim dan Booth Ken, Worlds in Collision: Terror and the Future of World Order.* (London: Palgrave Macmillan, 2002) Hal.2

² *Ibid.* Hal 2

elemen kelima dari Lima Pilar Kebijaksanaan Herbert Bush sebagai landasan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Israel.

Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dengan Israel mengalami peningkatan intensitas pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton. Lima pilar kebijaksanaan Herbert Bush digantikan dengan kebijakan “*Israel First Policy*” yang berisi tentang kerjasama perdamaian dan pengadaan senjata militer untuk kepentingan politik luar negeri Israel. Martin Indyk selaku petugas senior Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat memberikan usul untuk menamai kebijakan tersebut “Pro Israel” yang berisi penguatan posisi Israel, pelemahan posisi Irak dan Iran, serta perlindungan Israel terhadap Front Timur.³ Front Timur adalah gerakan komunisme yang digagas oleh Uni Soviet dalam rangka mempengaruhi negara dunia ketiga untuk meyakini paham ketimuran anti liberalisme barat. Perubahan intensitas hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Israel pada masa pemerintahan Presiden Clinton dibandingkan dengan Herbert Bush terletak pada penandatanganan perjanjian Oslo antara Israel dan Palestina. Inti perjanjian tersebut terletak pada penekanan hak – hak pemerintahan independen Palestina sekaligus pelepasan pengaruh Amerika Serikat terhadap akomodasi perdamaian konflik Arab – Israel. Berdasarkan landasan perjanjian Oslo, Bill Clinton dapat secara sah memberikan bantuan donor kepada Israel sebesar tiga juta dolar per tahun.⁴

³ *Ibid.* Hal. 3

⁴ Shlaim, Avi. *The US and the Israeli – Palestinian Conflict dalam Dunne, Tim dan Booth Ken, Worlds in Collision: Terror and the Future of World Order.* (London: Palgrave Macmillan, 2002.) Hal.4

Pada masa pemerintahan George W. Bush kebijakan Pro Israel mengalami perubahan intensitas sekali lagi yang disebabkan oleh peristiwa 11 September. Sebelum peristiwa 11 September terjadi, pada tahun telah ada Komite Aksi Politik Israel yang bekerja sama dengan Organisasi Yahudi Amerika sebagai lobi Israel di Amerika untuk memperkuat posisi Israel di dunia barat berdasarkan politik luar negerinya.⁵ Kedekatan pemerintah George W. Bush dengan Israel dipengaruhi oleh berbagai macam kepentingan, misalnya pengaruh dari kelompok kepentingan. Hal ini diperkuat oleh klaim Vaughn P. Shanon dalam studinya. Shanon menyatakan bahwa:

“How the US Congress came to be so pro-Israel may have a lot to do with interest groups. The most noted interest group related to US foreign policy is AIPAC, the American Israel Public Affairs Committee. Its electoral connections and financial and organizational strength are unparalleled by anything constituting an ‘Arab’ or ‘Palestinian’ lobby”⁶

Dalam klaim Vaughn P. Shanon diindikasikan bahwa peran George W. Bush dalam keberlanjutan kebijakan Pro Israel dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Keterkaitan antara George W. Bush dalam keputusan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Israel sebelum peristiwa 11 September terletak pada penandatanganan George W. Bush terhadap rencana dukungan militer Amerika Serikat yang dinaungi oleh program *Foreign Military Financing* yaitu sebuah program yang ditujukan untuk membiayai kapabilitas militer dan persenjatan negara aliansi Amerika Serikat untuk mendukung kepentingan Amerika Serikat dalam pelaksanaan tujuan keamanan.

⁵ Shannon, P. Vaughn, *The Middle East Peace Process After 9/11* dalam *American War on Terror* (London : Palgrave Macmillan, 2001) Hal. 134

⁶ *Ibid.* Hal. 1

Peningkatan intensitas hubungan Amerika Serikat dan Israel belum terlihat secara signifikan sebelum peristiwa 11 September.

Pasca peristiwa 11 September, orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dilandasi dengan kebijakan “*War On Terrorism*”. Pada tahun 2002 diterbitkan “*Seal of The President of The United States*” yaitu keputusan resmi dari George W. Bush yang menandai siapa saja lawan dan kawan bagi Amerika Serikat. Salah satu jargon politik George W. Bush yang terkenal pasca peristiwa 11 September adalah “*To remain steadfast with our ally Israel.*” Dalam jargon politik tersebut terdapat indikasi bahwa Amerika Serikat mempertahankan hubungan dengan Israel, sekaligus sebagai pernyataan bahwa Israel merupakan sekutu dari Amerika Serikat.

Pada tahun 2004 terjadi ketegangan antara pemerintah dengan masyarakat Amerika Serikat. Masyarakat Amerika Serikat menunjukkan krisis kepercayaan terhadap Kongres, Senat, dan komite pemerintahan George W. Bush akibat tidak transparannya alokasi pajak dalam anggaran belanja AS. Survey Gallup tahun 2004 menunjukkan bahwa alokasi pajak terhadap anggaran militer dimanifestasikan sebesar 75% dari keseluruhan anggaran belanja AS.⁷ Alokasi anggaran belanja untuk kesehatan, keamanan sosial, dan program – program sosial melonjak turun dari sebesar 40% menjadi 18% saja, kongres bahkan tidak mengagendakan rapat pembahasan perubahan alokasi anggaran belanja tersebut yang telah mengakibatkannya

⁷ Mc.Kay, David, *American Politics And Society: Sixth Edition*. (UK: Blackwell Publishing, 2005) Hal. 365

melonjaknya biaya kesehatan.⁸ Pemerintahan Bush bahkan mengatur penambahan dukungan militer Israel sebanyak enam juta dollar per tahun pasca tahun 2001.⁹ Pertambahan dukungan militer tersebut tidak hanya disalurkan dalam bentuk donor atau bantuan ekonomi melainkan pada bantuan persenjataan, infrastruktur, hingga benteng pertahanan. Kebijakan tambahan tersebut dikenal dengan nama “*Foreign Military Financing*” (FMF) yang didata mengalami kenaikan sebesar tiga milyar dollar per tahun hingga tahun 2011. Berdasarkan kesenjangan alokasi dana belanja pemerintah yang memicu keresahan dari masyarakat Amerika Serikat tersebut maka diperoleh indikasi bahwa kebijakan Pro Israel mengalami peningkatan intensitas pasca peristiwa 11 September. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa George W. Bush tidak dapat memenuhi kapabilitasnya sebagai kepala negara yang pernah tertuang dalam jargon politiknya yang berbunyi “*Land of freedom and opportunity*”.

Penelitian ini ditujukan untuk membuktikan latar belakang peningkatan intensitas hubungan bilateral antara Amerika Serikat dengan Israel yang dilakukan oleh George W. Bush. Berdasarkan karakteristik perubahan jargon dan kesenjangan antara servis sosial dengan keamanan internasional terindikasi tentang adanya keberlanjutan kebijakan Pro Israel. Keberlanjutan kebijakan Pro Israel tidak terlepas dari serangkaian pengaruh yang berimbas kepada proses keberlanjutan kebijakan tersebut. Penelitian ini sekaligus ditujukan untuk membuktikan tentang apakah

⁸ *Ibid.* Hal. 364

⁹ Sharp, Jeremy M. *US Forreign Aid To Israel.* (Pemerintah AS: Congressional Research Centre, 2010) Hal. 12

kebijakan Pro Israel itu mengalami perubahan intensitas, serta apakah George W. Bush merupakan aktor kunci di balik keberlanjutan kebijakan Pro Israel.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa George W. Bush meningkatkan intensitas kebijakan Pro Israel pasca peristiwa 11 September?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum pengerjaan skripsi ini adalah untuk mengetahui latar belakang intensitas kebijakan Pro Israel sebelum dan sesudah peristiwa 11 September. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada peran aspek budaya terhadap aktor pembuat kebijakan dalam mempengaruhi proses kebijakan luar negeri Amerika Serikat Pro Israel. Penelitian ini sekaligus dibuat untuk membuktikan bahwa George W. Bush merupakan individu yang terindikasi menjadi aktor kunci dalam penentu keberlanjutan kebijakan Pro Israel.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan dari penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, peristiwa 11 September dalam penelitian ini ditujukan sebagai indikator intensitas kebijakan Pro Israel. Fungsi dari peristiwa 11 September antara lain tidak hanya sebagai batasan waktu, namun sekaligus sebagai peristiwa yang diindikasikan mempengaruhi keberlangsungan kebijakan Pro Israel pada masa pemerintahan

George W. Bush. Tujuan lain dari penggunaan peristiwa 11 September adalah untuk mengetahui perbedaan antara karakteristik pemerintahan George W. Bush yang diindikasikan mengalami perubahan orientasi. Perubahan orientasi tersebut misalnya diterapkan kepada fokus kebijakan yang berhubungan dengan perang melawan terorisme. Penelitian ini ditujukan tidak untuk memberikan bukti tentang aktor yang perlu bertanggung jawab dalam peristiwa 11 September, namun menjelaskan tentang pengaruh dari peristiwa 11 September terhadap hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Israel.

Tujuan khusus kedua, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang dominasi George W. Bush dalam kebijakan Pro Israel. Dominasi George W. Bush sebagai badan eksekutif Amerika Serikat dijelaskan melalui sistem politik yang terlegitimasi sehingga bisa disimpulkan apakah George W. Bush merupakan individu yang secara hukum sah untuk menjalankan proses pembuatan kebijakan Pro Israel. Di dalam proses pembuatan kebijakan Pro Israel akan dijelaskan pula tentang pengaruh penasihat – penasihat yang melingkupi kinerja George W. Bush di dalam lembaga eksekutif.

Tujuan khusus yang ketiga adalah untuk menerapkan tiga variabel dari Teori Budaya Strategis yang berbunyi *Causal Judgement*, *Cognitive Mapping*, dan *Symbol Analysis*. *Causal Judgement* digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari kseimbangan antara lingkungan dengan tindakan yang dipengaruhi oleh

lingkungan tersebut.¹⁰ Definisi dari lingkungan adalah kondisi yang melingkupi proses pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap kebijakan tersebut, dalam hal ini Pro Israel. *Cognitive mapping* berfungsi untuk menjelaskan bagaimana George W. Bush mendapatkan informasi tentang kebijakan Pro Israel berdasarkan pengaruh interaksinya dengan para penasihat badan eksekutif.¹¹ Analisis simbolik atau *Symbol Analysis* dipergunakan untuk memperlihatkan tindakan dari George W. Bush baik berupa jargon dan kegiatan pasca peristiwa 11 September yang menunjukkan indikasi peningkatan intensitas kebijakan Pro Israel.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan contoh penelitian kajian kebijakan luar negeri dalam Hubungan Internasional. Kajian kebijakan luar negeri merupakan salah satu ruang lingkup penelitian bagi mahasiswa Hubungan Internasional. Kebijakan yang diteliti dalam penelitian ini berkenaan dengan kebijakan anti terorisme yang memiliki imbas terhadap intensitas kebijakan Pro Israel. Pengaruh dari peristiwa 11 September dan lingkungan penasihat George W. Bush sebagai individu yang diindikasikan memiliki dominasi dalam kebijakan Pro Israel, merupakan contoh studi kasus kajian kebijakan luar negeri.

¹⁰ Bradley, Richard, dkk. *Aggregating Causal Judgment*. (London: Journal of Theoretical Politics Volume 19. 2011) Hal. 391

¹¹ Ackermann. *Getting Started With Cognitive Mapping*. (www.banxia.com diunduh pada tanggal 23 Juli 2012) Hal. 2

Manfaat lain yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai alternatif pilihan jenis penelitian yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa peminatan studi budaya dalam hubungan internasional. Elemen tindakan individu dan pengaruh persepsi akibat sistem internasional merupakan contoh dari studi kasus penelitian yang berhubungan dengan kebudayaan dalam Hubungan Internasional. Sebagai pelajar S1, peneliti dituntut untuk mampu mengaplikasikan teori, dalam hal ini Teori Budaya Strategis terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan bidang studi yang telah ditempuh. Penelitian ini menambah referensi atau bahan perbandingan wacana terhadap kasus 11 September yang dilihat melalui perspektif budaya dalam Hubungan Internasional. Penelitian sekaligus memberikan fakta tentang pentingnya memahami dimensi budaya individu dan psikopolitik yang dapat berpengaruh terhadap negara yang dipimpin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Terdahulu

Sejumlah peneliti telah melakukan klaim dalam tesisnya bahwa kebijakan pro Israel AS merupakan manifestasi dari politik strategis AS di Timur Tengah, salah satunya adalah Avis Shlaim dan Clyde R. Mark. Peneliti yang pernah melakukan klaim bahwa kebijakan pro Israel AS dilatarbelakangi oleh manifestasi politik strategis AS di Timur Tengah adalah Clyde R. Mark. Dalam studinya Ia menyatakan bahwa AS mendukung pembentukan negara Yahudi di Israel karena – sebagai aliansi AS – Israel memiliki hak-hak demokratik yang dapat memperkuat eksistensi AS di Timur Tengah.¹² Bukti kerjasama bilateral tersebut ditandai oleh beberapa perjanjian. Catatan perjanjian antara AS dan Israel antara lain adalah “PLO Declarations of Principles” yang ditandatangani di Washington pada tanggal 13 September 1993, dan Perjanjian Hebron pada tanggal 15 Januari 1997.

Sejarah mencatat sejak rezim Presiden Truman, Reagan, Clinton, hingga George Bush Junior, politik strategis AS selalu dilandasi dengan hubungan bilateral yang baik antara AS dengan Israel. Bangsa arab menemui banyak kesulitan untuk mengakomodasi konflik Israel dan Palestina akibat kehadiran AS sebagai aliansi utama Israel. Keputusan Presiden Truman untuk mendukung kemerdekaan bangsa

¹² Mark, R. Clyde, *Almanac of Policy Issues*. (Congressional Research Service. www.policyalmanac.or, diunduh pada tanggal 20 November)

Yahudi Israel didukung oleh Inggris dan dirangkum dalam Deklarasi Balfour pada tahun 1917.¹³ Keputusan tersebut dilanjutkan dalam resolusi oleh Ronald Reagan dengan cara menjamin kemerdekaan Yahudi Israel dengan pengungsi Yahudi pasca penjajahan Nazi sebagai alasannya. Reagan mengklaim kepentingan eksistensinya di Timur Tengah adalah untuk menghindarkan pengaruh Uni Soviet terhadap sumber daya petroleum bangsa arab. Pada tahun 1992, untuk membendung keterlibatan Israel, Suriah, dan Mesir dalam perang nuklir Irak, Presiden Bush Senior menyetujui dicairkannya bantuan kepada Israel kepada Perdana Menteri Yitzhak Rabin. Bush Senior menganggap keterlibatan Israel dalam perang Irak akan membahayakan posisi AS di Timur Tengah sebagai akomodator proses perdamaian konflik arab Israel.

Hal yang membedakan ranah penelitian Clyde R. Mark dengan peneliti terletak kepada jenis latar belakang penelitian. Penelitian Clyde R. Mark ditujukan kepada latar belakang hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Israel sehingga pembahasannya meluas kepada perjanjian internasional, sejarah hubungan bilateral, hingga dinamika hubungan Amerika Serikat dan Israel secara khusus berdasarkan beberapa rezim. Peneliti bertujuan untuk membahas apa yang membuat kebijakan Pro Israel diindikasikan mengalami peningkatan intensitas dan mengapa George W. Bush merupakan aktor di balik peningkatan intensitas tersebut menjadi kultur dominan dalam kebijakan Pro Israel. Kesimpulannya penelitian ini secara khusus membahas tentang satu ranah kebijakan khusus yang melandasi hubungan bilateral antara

¹³ *Ibid.*

Amerika Serikat dan Israel yang diindikasikan mengalami peningkatan intensitas pasca peristiwa 11 September terjadi.

Penelitian lain yang membahas tentang dinamika hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Israel adalah Avi Shlaim. Dalam penelitiannya yang berjudul “The US and the Israeli – Palestinian Conflict”, Avi Shlaim memberikan beberapa data tentang kebijakan pro Israel praktis sebelum dan setelah digagasnya kebijakan tersebut oleh beberapa presiden Amerika Serikat. Shlaim memberikan klaim bahwa kebijakan tersebut merupakan produk dari rezim Presiden Bill Clinton bersama dengan Martin Indyk.

“On becoming President, Bill Clinton gave free rein to his pro-Israeli sympathies. He abruptly reversed the even-handed policy of his predecessor and replaced it with an ‘Israel-first’ policy reminiscent of the Reagan years. The new approach was laid out by Martin Indyk, a senior official on the National Security Council, in a speech he gave to the Washington Institute for Near East Policy on 18 May 1993. Two elements were listed by Indyk as central: Israel had to be kept strong while the peace process continued, and Iraq and Iran had to be kept weak¹⁴”

Penelitian tersebut dimuat dalam kumpulan jurnal akademis terbitan Palgrave yang berjudul “*Worlds in Colission: Terror and the Future of World Order*” pada tahun 2002. Dalam meneliti kebijakan pro Israel dan hubungan bilateral antara AS dengan Israel, Shlaim mengkaitkan sejumlah peristiwa bersejarah seperti perang teluk dan perang di Afghanistan. Shlaim juga memberikan sejumlah informasi tentang catatan koalisi antar agresor di Timur Tengah dengan presiden AS yang kala itu

¹⁴ Shlaim, Avi. *The US and the Israeli – Palestinian Conflict dalam Dunne, Tim dan Booth Ken, Worlds in Colission: Terror and the Future of World Order.* (London: Palgrave Macmillan, 2002.) Hal.3

menjabat. Hubungan bilateral dengan kebijakan pro Israel yang memicu kemarahan dunia internasional, oleh Shlaim di klaim layak membuat AS menjadi sasaran teror 11 September. Buktinya, pasca teror 11 September, Israel mengajukan pemusatan perhatian AS yang lebih intens sehingga mengurangi perhatian AS terhadap bangsa arab di Timur Tengah. Hal ini dipandang tidak adil mengingat AS merupakan konsumen minyak utama di Timur Tengah dan telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan bangsa arab.

Menurut Shlaim, proses pembuatan kebijakan Pro Israel cenderung fluktuatif karena dipengaruhi oleh karakter dari *descicion maker* - nya.¹⁵ Presiden Bush senior menganggap Yasser Arafat sebagai seorang teroris sehingga Ia menjalin hubungan yang lebih baik dengan pemimpin Israel sayap kanan. Bush Senior pada dasarnya menganggap dengan memperkuat Israel dan membiarkan kolonialisasinya terhadap West Bank akan merugikan AS sehingga Bush menggagalkan pemilu Itzhak Shamir. Setelah kekalahan Bush Senior dalam pemilu, Bill Clinton mengambil alih peran AS di Timur Tengah. Pada bulan Mei 1999 saat Ehud Barak memenangkan pemilu, Clinton memutuskan untuk berkoalisi dan bersedia untuk membantu penuh Israel dengan memperkuat sumber dayanya. Namun segala daya upaya Clinton juga tidak membuahkan hasil di Camp David pada tahun 2000 karena Yasser Arafat tidak menyetujui adanya proses perdamaian Israel – Palestina. Clinton menuntut rakyat Palestina untuk menyerahkan seluruh wilayah Gaza dan 96 persen aset West Bank kepada Israel dengan menjajikan kepulauan Palestina ke wilayah Holy Land.

¹⁵ *Ibid.* Hal. 4

Persyaratan perdamaian ini dianggap sangat berpihak kepada Israel dan membuat Ehud Barak akhirnya lengser oleh Ariel Sharon.

Dengan melihat rentetan sejarah di atas Shlaim memberikan kesimpulan dengan tetap adanya bantuan moral, material, dan militer dari AS maka kebijakan pro Israel akan tetap ada sehingga perdamaian di Timur Tengah masih berada jauh di awang-awang. Sangat logis untuk memperhitungkan bahwa serangan 11 September yang masih belum dapat dipastikan pelakunya dilatar belakangi oleh hubungan bilateral AS dan Israel yang merugikan bangsa arab.

Di dalam penelitiannya, Clyde R. Mark memberikan contoh latar belakang kebijakan pro Israel dengan cara menjelaskan proses dibuatnya kebijakan tersebut. Data-data yang diberikan cenderung berorientasi kepada kepentingan ekonomi dengan memberitakan catatan perjanjian dan dana-dana hutang Israel terhadap Amerika Serikat. Identik dengan Avi Shlaim, Clyde R. Mark juga memberikan keterkaitan sejarah antara hubungan beberapa presiden AS dalam proses pembuatan kebijakan Israel, dimulai dari Presiden Truman, Reagan, hingga Bush Senior. Penjelasan latar belakang permasalahan menggunakan studi pustaka dan analisis kebijakan tanpa menyangkutkan dimensi nilai, norma, dan kebudayaan dari pembuat kebijakan itu sendiri.

Avi Shlaim memberikan studi kebijakan dan historis dengan mencantumkan dua nama presiden yakni George Bush Senior dan Bill Clinton. Perbedaan antara penelitian Avi Shlaim dengan peneliti terletak kepada jangka waktu dan orientasi

penelitian. Avi Shlaim memberikan pembahasan tentang dinamika hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Israel sebelum dan sesudah terjadinya perang teluk. Pembahasannya difokuskan kepada bagaimana hubungan antara Amerika Serikat dan Israel berdampak kepada hubungan antara Amerika Serikat dengan Afganistan serta hubungan antara Amerika Serikat dengan negara – negara teluk. Di dalam penelitian ini, indikator perubahan intensitas hubungan antara Amerika Serikat dengan Israel justru menjadi faktor yang dipengaruhi oleh peristiwa 11 September. Variabel independen dari penelitian ini adalah peristiwa 11 September sedangkan variabel dependennya adalah kebijakan Pro Israel.

Penelitian ini dibuat untuk melihat sejauh mana peran nilai dan kebudayaan seorang individu berpengaruh terhadap suatu kebijakan . Penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana peran George W. Bush dalam keberlangsungan kebijakan Pro Israel pasca peristiwa 11 September berdasarkan teori Budaya Strategis. Hal ini berarti elemen identitas dan kebudayaan dari seorang individu harus dijelaskan untuk melihat latar belakang dan kaitan peristiwa yang membuat kebijakan Pro Israel terus berlangsung. Berdasarkan studi pustaka peneliti dapat melihat bahwa kebijakan pro Israel memberikan kontribusi dari peristiwa 11 September. Peneliti tidak dapat memberikan klaim terhadap pelaku peristiwa 11 September namun dapat melihat catatan sejarah sebelum peristiwa tersebut. Dua penelitian di atas memberikan contoh analisis kebijakan berdasarkan hal-hal yang bersifat lebih umum, Mark dengan analisis perjanjian kerjasama, dan Shlaim dengan mengkaitkan sejumlah perang.

Faktor ekonomi dan politik merupakan dua faktor yang umum digunakan dalam penelitian Politik Internasional sehingga peneliti akan menggagas penelitian dengan menggunakan faktor budaya dalam Hubungan Internasional. Berikut adalah tabel perbandingan penelitian Clyde R. Mark dan Avi Shlaim

Tabel 1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Aspek Perbandingan			Peneliti
	Variabel Penelitian	Aspek Substansial	Metode Penelitian	
1	Proses dan dinamika hubungan bilateral AS dan Israel sejak Presiden Truman, Reagan, dan Bush Senior	Orientasi analisis ekonomi dengan konsep interdependensi antara power Israel dan AS.	Studi perjanjian bilateral dan multilateral sebagai dinamika hubungan AS dengan Israel pra kebijakan pro Israel	Clyde R. Mark
2	Latar belakang dan proses pembuatan kebijakan pro Israel sejak Presiden Bush Senior hingga Bill Clinton	Orientasi analisis faktor tradisional dalam Hubungan Internasional dengan pendekatan realisme klasik.	Studi historis keterkaitan antara perang Afghanistan dan Perang Teluk terhadap eksistensi kebijakan pro Israel	Avi Shlaim

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Defisini Umum Teori Budaya Strategis

Kebudayaan merupakan elemen penting yang dipandang memiliki peran dalam menjelaskan fenomena internasional. Perang Dingin dan krisis komunisme merupakan contoh dari benturan kepentingan yang diakibatkan oleh kontradiksi nilai dan kepentingan suatu negara. Beberapa penggagas teori perspektif budaya strategis antara lain Alastain Johston, Levi Strauss, Clifford Geertz, hingga bapak konstruktivis Alexander Wendt. Jeffrey Lantiss dalam wacananya yang berjudul “*Strategic Culture From Clausewitz to Constructivism*” mencatat sejumlah revolusi Teori Budaya Strategis itu sendiri.

Teori ini pertama kali digagas oleh Levi Strauss pada tahun 1940 untuk meneliti karakter nasional dengan cara melihat hubungan antara kebudayaan dan perilaku sosial suatu negara. Elemen-elemen seperti bahasa, kepercayaan, kebiasaan, sosialisasi, dan intepretasi merupakan penunjang terbentuknya teori ini.¹⁶ Menurut Clifford Geertz, budaya adalah sebuah pola historis yang tertanam dalam simbol yang menciptakan sistem-sistem dimana manusia bisa saling berkomunikasi, mendapatkan pengetahuan hingga membagi pengetahuan tersebut kepada orang lain. Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba konsep budaya politik adalah komitmen terhadap suatu nilai seperti demokrasi, ide-ide moralitas, dan penggunaan ancaman terhadap peran suatu negara dalam politik global. Pada tahun 1992 Alexander Wendt

¹⁶ Lantiss, Jeffrey S. *Strategic Culture From Clausewitz to Constructivism*, (Jstor Journal, 2006) Hal. 34

menyatakan bahwa identitas suatu negara dan kepentingannya dapat dilihat melalui konstruksi-konstruksi sosial yang terbentuk. Pendekatan konstruktivisme seringkali digunakan untuk mempertegas penggunaan teori Budaya Strategis. Di dalam pendekatan konstruktivisme terdapat unsur proses organisasional, sejarah, tradisi, hingga budaya yang dapat mempengaruhi politik dan budaya strategis suatu bangsa.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori Budaya Strategis oleh Alastair Johnston. Secara umum, generalisasi dari Teori Budaya Strategis adalah

“Strategic Culture is that arrangement of shared beliefs, norms, traditions, assumptions, and styles of behavior, originated from common experiences and accepted narratives (both oral and written), that shape collective identity and relationships to other groups, and which determine suitable ends and means for attaining security objectives”¹⁷

Sebagaimana penjabaran teori diatas, Pemilik kultur dominan disebutkan oleh Johnston dapat diindikasikan mempengaruhi cara pandang politik antar bangsanya.¹⁸ Edward B. Tylor sebagai salah satu penggagas Teori Budaya Strategis juga menyebutkan bahwa sebuah tujuan pasti mengandung makna tertentu. Di dalam tujuan yang diterapkan oleh individu terkandung elemen pengetahuan, kesenian, kepercayaan, hukum, moral, kebiasaan, dan apapun yang membentuk perilaku seorang individu dalam masyarakat.¹⁹ Teori ini dapat digunakan untuk menguji

¹⁷ Johnston, Alastair, *Thinking About Strategic Culture* (Jstor Journal : *International Security* vol. 19 no. 4 Spring, 1995) Hal. 56

¹⁸ *Ibid.* Hal. 57

¹⁹ Haglund, David G, *What Good Is Strategic Culture* dalam Johnson, L. Jeannie, Kerry M. Kartchner, dan Jeffrey A. Larsen (eds.). *Strategic culture and the Weapons of Mass Destruction*. (London : Palgrave Macmillan, 2009)

sekumpulan kepercayaan, nilai, norma, dan identitas yang membentuk sebuah kerangka keputusan tertentu.

2.2.2 Tiga Arus Teori Budaya Strategis

Arus pertama dari teori budaya strategis digagas pada tahun 1980 oleh Jack Snyder dimana fokus utama adalah mencari fakta perbedaan persepsi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet terhadap strategi nuklir. Perbedaan persepsi yang mempengaruhi tindakan Amerika Serikat dan Uni Soviet tersebut diakibatkan oleh faktor perbedaan kebudayaan, kultur dominan politik, dan geografis. Ketiga pengaruh tersebut diperoleh dari studi Jack Snyder tentang doktrin nuklir Uni Soviet. Perbedaan karakteristik historis serta geografis menurut Snyder mempengaruhi pola kepercayaan masyarakat Amerika Serikat dan Uni Soviet secara keseluruhan. Pengaruh tersebut akhirnya menciptakan perbedaan persepsi terhadap produksi nuklir pula. Menurut Jones terdapat tiga input level yang membentuk sebuah kebudayaan strategis. Pertama, faktor lingkungan makro seperti letak geografis, karakteristik etno kultural, dan sejarah. Kedua, faktor sistem sosial seperti ekonomi dan struktur politik. Ketiga, faktor mikro seperti institusi militer dan hubungan antara sipil dengan militer.²⁰ Kesimpulannya arus pertama Teori Budaya Strategis tidak ditujukan untuk membuktikan bahwa sebuah strategi politik itu dapat memproduksi kebudayaan, namun bagaimana sebuah strategi politik itu diproduksi berdasarkan kebudayaan strategis sebuah negara.

²⁰ *Ibid.* Hal38

Arus kedua dari Teori Budaya Strategis digagas pada awal tahun 1980an. Arus kedua lebih bersifat membuktikan bahwa ada perbedaan antara apa yang dipikirkan oleh seorang individu untuk dilakukan dengan motif – motif yang sesungguhnya muncul saat sebuah tindakan dilakukan.²¹ Arus kedua terinspirasi oleh kinerja dari Bradley S. Klein yang meneliti tentang adanya kepentingan Amerika Serikat dalam setiap peperangan yang digagas oleh pemimpinnya. Kebudayaan strategis dalam arus ini dipandang sebagai alat untuk memperluas hegemoni politik yang diterapkan dalam proses pembuatan keputusan. Salah satu manifestasi perluasan hegemoni tersebut bisa berupa bagaimana seorang pemimpin negara dapat menggunakan kekerasan yang terlegitimasi terhadap apa yang dianggap sebagai “musuh”. Menurut Klein, kebudayaan strategis itu diperoleh berdasarkan pengalaman historis. Diskursus simbolik dan penggunaan analisis – analisis simbolik menghasilkan budaya strategis, kemudian mempengaruhi tindakan. Peneliti harus menjawab adanya hubungan dialektik antara budaya strategis dan tindakan instrumen obyek.

Arus ketiga dari Teori Budaya Strategis digagas pada awal tahun 1990an dimana terdapat penambahan analisis variabel tunggal yang mulai jauh dari faktor negara sebagai aktor tunggal.²² Definisi kebudayaan yang dimaksud dalam arus ketiga ini dicerminkan dari pilihan – pilihan rasional yang melingkupi seorang pembuat keputusan. Berdasarkan pada definisi tersebut, muncullah analisis – analisis

²¹ Haglund, David G, *What Good Is Strategic Culture* dalam Johnson, L. Jeannie, Kerry M. Kartchner, dan Jeffrey A. Larsen (eds.). *Strategic culture and the Weapons of Mass Destruction*. (London : Palgrave Macmillan, 2009). Hal 39

²² Johnston, Alastair, *Thinking About Strategic Culture* (Jstor Journal : *International Security* vol. 19 no. 4 Spring, 1995) Hal 41

yang lebih luas terhadap kebudayaan strategis sebuah negara, misalnya kebudayaan militer, kebudayaan politik militer, dan kebudayaan organisasi internasional.

2.2.3 Penggunaan Variabel Dalam Teori Budaya Strategis

Peneliti harus menentukan tujuan dari penelitian akademisnya sebelum melakukan pengukuran variabel terhadap Teori Budaya Strategis. Johnston menyebutkan, jika orientasi analisis berada dalam taraf meneliti tujuan strategis seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan keamanan negaranya. Di dalam penelitian ini, individu yang diindikasikan memegang kultur dominan dari peningkatan intensitas kebijakan Pro Israel adalah George Bush. Bush merupakan tokoh kunci dalam keberlangsungan kebijakan Pro Israel yang membuat keputusan untuk tidak mengubah manifestasi politik strategis AS di Timur Tengah sama sekali. Peneliti juga harus menentukan salah satu dari tiga arus Teori Budaya Strategis yang sesuai dengan peringkat analisis dan rumusan masalah.

Arus ke dua dari teori ini dianggap paling sesuai untuk menjawab rumusan masalah. Teori Budaya Strategis arus kedua secara umum digunakan untuk mengetahui bagaimana individu membuat sebuah keputusan atau *rational choice* (pilihan rasional).

*Strategic Culture is seen as a tool of political hegemony in the realm of strategic decision-making; it establishes "widely available orientations to violence and to ways in which the state can legitimately use violence against putative enemies."*²³

²³ Ibid. Hal 20

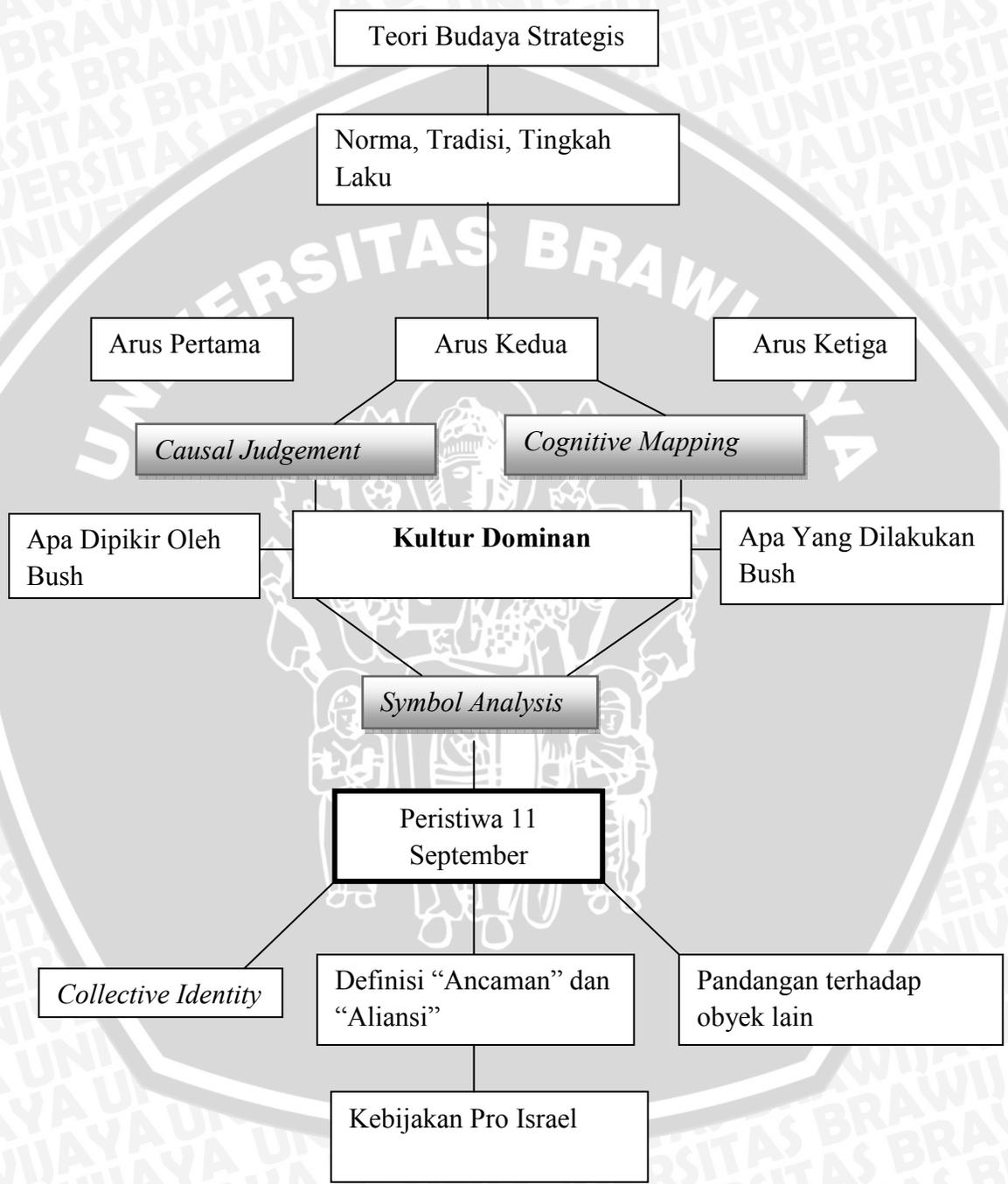
Berdasarkan pernyataan tersebut diperoleh indikasi bahwa kebudayaan strategis dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian hegemoni politik. Pemanfaatan hegemoni politik tersebut dapat digunakan sebagai motif penggunaan kekerasan yang terlegitimasi terhadap ancaman – ancaman yang telah ditentukan oleh seorang pembuat keputusan. Operasionalisasi strategis juga dapat mempengaruhi kepentingan dari pembuat keputusan. Frase *descicion maker* dipergunakan dalam artian siapa yang memutuskan adanya intensitas kebijakan Pro Israel. Aspek – aspek yang melingkupi tindakan dari seorang pembuat keputusan antara lain adalah diskursus simbolik dan hubungan yang dialektik antara kebudayaan strategis dengan instrumen obyek penelitian.²⁴ Arus kedua ini dipandang relevan mengingat level analisis penelitian ini bergerak dalam taraf individu dimana George W. Bush merupakan aktor kunci yang diindikasikan memutuskan keberlanjutan kebijakan Pro Israel.

2.3 Operasionalisasi Teori

Dalam menjelaskan bagaimana elemen – elemen kebudayaan strategis dapat dihubungkan dengan perilaku individu, peneliti memberikan penjelasan operasionalisasi berdasarkan skema gambar. Berikut adalah skema operasionalisasi teori yang dimaksud:

²⁴ Johnston, Alastair, *Thinking About Strategic Culture* (Jstor Journal : *International Security* vol. 19 no. 4 Spring, 1995) Hal 40

Gambar 1 : Skema Operasionalisasi Teori



Berdasarkan penggambaran skema tersebut, arus yang digunakan untuk membedah rumusan masalah adalah arus kedua. Berdasarkan definisi umum dari Teori Budaya Strategis oleh Alastair Johnston diperoleh elemen norma, tradisi, dan tingkah laku yang membentuk sebuah identitas kolektif dan pandangan terhadap obyek di luar kultur dominan. Penjelasan Teori Budaya Strategis arus kedua oleh Johnston adalah sebagai berikut:

Strategic Culture is seen as a tool of political hegemony in the realm of strategic decision-making; it establishes “widely available orientations to violence and to ways in which the state can legitimately use violence against putative enemies.”²⁵

Dalam hal ini George W. Bush yang digunakan sebagai obyek analisis dipandang sebagai subyek pembawa kultur dominan Amerika Serikat yang diindikasikan menjadi aktor di belakang keberlanjutan kebijakan Pro Israel yang mengangkat masalah hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Israel. Penggunaan kalimat “...which state can legitimately use violence against putative enemies” memberikan landasan berpikir yang menyatakan dalam setiap kultur dominan seorang rezim terdapat definisi tersendiri tentang apa yang disebut dengan musuh, dan apa yang seharusnya dilakukan kepada musuh. Elemen psikologi politik dapat digunakan sebagai alat operasionalisasi teori yang menghasilkan sistem identitas kolektif, cara pandang, hingga lahirnya keputusan keberlanjutan kebijakan Pro Israel.

²⁵ Johnston, Alastair, *Thinking About Strategic Culture* (Jstor Journal : *International Security* vol. 19 no. 4 Spring, 1995) Hal. 56

Teori Budaya Strategis dibangun berdasarkan tiga variabel pengujian antara lain Causal Judgement, Cognitive Mapping, dan Symbol Analysis. *Causal judgement* digunakan untuk menguji karakter Bush sebagai individu atau keeper dari budaya strategis AS. Bush sebagai individu merupakan aktor kunci yang menjamin keberlangsungan kebijakan Pro Israel pasca peristiwa 11 September. Konsep kebudayaan penguasa digunakan sebagai obyek analisis individu sehingga peneliti harus mencari fakta tentang biografi, karakter, serta nilai norma Bush. *Causal judgement* secara khusus diaplikasikan untuk melihat indikator – indikator apa yang dapat mempengaruhi tindakan George W. Bush untuk melanjutkan kebijakan Pro Israel.

Dalam tinjauan metodologisnya, definisi dari ketiga variabel Teori Perspektif Budaya Strategis antara lain:

2.3.1 Causal Judgement

Causal Judgement adalah penilaian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan nilai dan kebudayaan dari obyek analisis. Variabel ini secara umum digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari kesinambungan antara lingkungan dengan tindakan yang dipengaruhi oleh lingkungan tersebut.²⁶ Definisi dari lingkungan adalah kondisi yang melingkupi proses pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap kebijakan tersebut, dalam hal ini Pro Israel. Di dalam penelitian ini, George W. Bush sebagai

²⁶ Bradley, Richard, dkk. *Aggregating Causal Judgment*. (London: Journal of Theoretical Politics Volume 19. 2011) Hal. 391

individu sekaligus sebagai unit analisis merupakan individu yang harus diteliti berdasarkan variabel *causal judgement* dengan cara melihat perilaku politiknya yang melingkupi tujuan dari kebijakan Pro Israel. Indikasi yang digunakan untuk memperjelas parameter variabel adalah peristiwa – peristiwa internasional, interpretasi sistem internasional, hingga karakteristik pemerintahan.

2.3.2 Cognitive Mapping

Penjelasan ilmiah dari variabel ini adalah teknik yang digunakan untuk mengungkap hubungan antara aksioma kausal tertentu dan efek perilaku dari seorang individu. *Cognitive mapping* berfungsi untuk menjelaskan bagaimana George W. Bush mendapatkan informasi tentang kebijakan Pro Israel berdasarkan pengaruh interaksinya dengan para penasihat badan eksekutif.²⁷ Pemetaan kognitif juga digunakan untuk melihat hubungan antara perilaku strategis berdasarkan kondisi lingkungan tempat proses pembuatan kebijakan Pro Israel berlangsung. Variabel ini diorientasikan kepada output dari kebijakan yang dianalisis. Parameter dari output sebuah kebijakan dipengaruhi oleh proses dari pembuatan kebijakan itu sendiri. Dalam aplikasinya, parameter tersebut diturunkan ke dalam indikasi bagaimana Bush sebagai seorang presiden dipengaruhi oleh penasihat yang berada dalam badan eksekutif.

²⁷ Ackermann. *Getting Started With Cognitive Mapping*. (www.banxia.com, diunduh pada tanggal 23 Juli 2012) Hal. 2

2.4.3 Symbol Analysis

Penjelasan ilmiah variabel analisis simbol adalah kegunaan elemen teks dan simbol untuk melihat watak dan perilaku seorang individu berdasarkan analogi dan metafora tertentu. Jargon politik dapat digunakan sebagai obyek analisis.

George W. Bush pernah mengumandangkan dua jargon politik. Yang pertama *“Either you are with us or with the terrorist”* dan *“All allies of United States, let’s gather massive bombing to Afghanistan and protect Israel from fundamentalism”*. Dua jargon tersebut dapat digunakan sebagai obyek analisis variabel ini yang dioperasionalisasikan berdasarkan indikator jargon populer Bush sesudah peristiwa 11 September terjadi.

Di dalam kapasitas fisik sumber daya teknologi peneliti harus menjelaskan power yang dimiliki oleh Bush dan kemampuannya dalam berpolitik antar bangsa. Pengalaman historis dan karakter dari Bush sebagai keeper budaya strategis harus dipertegas dengan memberikan data tentang sistem politik dan rentetan sejarah perilaku politiknya. Simbol dan teks disini dimaksudkan untuk menjelaskan nilai-nilai politik, komunitas sosial, atau perilaku strategis yang berhubungan langsung dengan motif dan strategi politik suatu obyek analisis.

Setelah ketiga variabel digunakan secaraimbang, peneliti harus melingkupi kerangka pemikiran berdasarkan potensi dalam negeri AS yang dijabarkan melalui sumber daya potensialnya. Kerangka tersebut masih harus dibatasi dengan

pengalaman politik historis Bush sebagai keeper sebagai metafora kebiasaannya. Melihat ketiga variabel penguji tersebut, Teori Perspektif Budaya Strategis digagas berdasarkan peran kebudayaan dalam Ilmu Hubungan Internasional.

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang dibangun berdasarkan turunan dari teori Budaya Strategis dengan rumusan masalah "Mengapa George W. Bush meningkatkan intensitas kebijakan Pro Israel pasca peristiwa 11 September?" adalah akibat pengaruh persepsi George W. Bush terhadap peristiwa 11 September dan lingkungan penasihat badan eksekutif. George W. Bush dikelilingi oleh penasihat dan anggota kongres yang secara hukum berwenang untuk memberikan saran tentang kebijakan yang mengatur tentang politik luar negeri Amerika Serikat. selain itu peristiwa 11 September sendiri menjadi titik balik utama arah kebijakan Pro Israel terutama tentang definisi aliansi dan ancaman, dari *social security* (kesejahteraan masyarakat Amerika Serikat) menuju *homeland security* (kepentingan pengaruh A.S dalam konflik Arab Israel).

BAB III

METODOLOGI

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Dalam menggunakan metode kualitatif, seorang peneliti Ilmu Hubungan Internasional dituntut untuk menghubungkan dan melakukan generalisasi dalam kaitan peristiwa dalam penelitian ilmiahnya.²⁸ Kegiatan keilmuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatif, yakni penelitian yang dapat dilakukan setelah mengadopsi beberapa teori tertentu dan telah mendapatkan hipotesa tertentu sehingga terkumpul berbagai generalisasi empiris.

Kelebihan dari Penelitian eksplanatif adalah penelitian dapat dikuasai oleh peneliti, sehingga dapat memperoleh ketepatan dalam pengukuran variabel-variabel yang diteliti. Sedangkan kelemahannya adalah sampai di manakah hasil penelitian tersebut berlaku. Peneliti dituntut untuk mengumpulkan data dan fakta tentang karakter George Bush yang melatarbelakangi keputusannya terhadap keberlangsungan kebijakan Pro Israel pasca peristiwa 11 September. Menurut David Marsh, metode kualitatif deskriptif menekankan pada sifat dinamis, terkonstruksi, dan bertumbuhnya suatu realitas sosial. Hal ini berarti adanya sangkut paut antara kebenaran subyektif seorang individu terhadap perilaku

²⁸ Marsh, David dan Stoker, Gerry, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. (Bandung: Penerbit Nusa Dua, 2010) Hal. 242

politiknya. Penekanan metode ini dilakukan dalam memahami pengalaman dan praktik individu yang membuatnya mengambil suatu keputusan penting.

Pada umumnya riset kuantitatif dipandang lebih memiliki dasar yang lebih kuat dan representatif. Dalam penelitian Hubungan Internasional, tidak semua riset dapat dilakukan dengan mencari data – data matematis atau survei lapangan langsung. Jika konsep penelitian terletak pada nilai budaya dalam Hubungan Internasional dengan subyek yang berada dalam catatan sejarah, maka metode kualitatif dengan studi pustaka sekunder merupakan langkah yang dapat dilakukan. Penelitian ini membahas tentang nilai dan karakter George Bush sebagai seorang individu sehingga membutuhkan data – data sekunder yang berasal dari biografi dan buku – buku yang menuliskan kiprah politik antar bangsa AS. Peneliti harus mampu melakukan generalisasi data – data yang berisi sekumpulan fakta untuk memperkuat posisi penelitian sehingga dinilai akademis.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Peristiwa 11 September di dalam penelitian ini tidak ditujukan sebagai jangka waktu batasan penelitian, namun sebagai indikator dari perubahan manifestasi pemerintahan George W. Bush. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada intensitas kebijakan Pro Israel pada masa pemerintahan George W. Bush tahun 2000 sampai dengan 2004. Batasan waktu tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa tahun 2000 sebelum peristiwa 11 September terjadi, orientasi kebijakan pemerintahan

George W. Bush terletak kepada servis sosial dan promosi kesejahteraan domestik. Pada tahun 2001 hingga 2005 pasca peristiwa 11 September orientasi kebijakan pemerintahan George W. Bush diindikasikan terfokus kepada proses peningkatan intensitas kebijakan Pro Israel sebagai imbas dari aksi perang melawan terorisme global.

Adapun untuk memberikan bukti perihal peningkatan intensitas kebijakan Pro Israel, maka peneliti memberikan contoh keberlangsungan kebijakan tersebut pada dua rezim sebelum George W. Bush, yaitu Herbert Walker Bush dan Bill Clinton. Tujuan dari perbandingan dua rezim tersebut dimaksudkan untuk memberikan keterangan tentang letak perubahan intensitas dari kebijakan Pro Israel. Baik Herbert Walker Bush maupun Bill Clinton diindikasikan pertama kali menggagas kebijakan Pro Israel sebagai landasan dari hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Israel. Meskipun demikian, penjelasan tentang intensitas kebijakan Pro Israel pada masa pemerintahan Herbert Walker Bush dan Bill Clinton bukan merupakan pokok analisis dari penelitian ini. Pokok analisis penelitian tetap berada dalam ruang lingkup pengaruh peristiwa 11 September terhadap intensitas kebijakan Pro Israel.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dan pencarian fakta yang dilakukan oleh peneliti adalah studi pustaka sumber sekunder. Hal ini dilakukan karena sangat minimnya kesempatan untuk melakukan survey lapangan secara langsung dalam mencari data

tentang nilai dan karakter Bush sebagai individu kunci dalam keberlangsungan kebijakan Pro Israel. Peneliti dituntut untuk mengumpulkan sejumlah buku dan jurnal yang berkaitan dengan rumusan masalah serta teori dalam penelitian.

Salah satu keuntungan dari teknik pengumpulan data dengan studi pustaka adalah biayanya yang ekonomis. Media internet seperti jurnal online dengan mudah dapat diakses dan diunduh untuk memenuhi kebutuhan wacana peneliti. Salah satu tantangan dari teknik pengumpulan data ini adalah inter subyektifitas antar penulis buku atau jurnal yang digunakan sebagai sumber wacana. Seringkali ditemukan ada beberapa perbedaan interpretasi, paradigma, hingga penguraian fakta antara penulis satu dan penulis lainnya. Peneliti dituntut untuk tetap bersikap netral dan teliti untuk menarik fakta – fakta yang berkesinambungan dan homogen antara satu sumber dengan sumber lainnya.

3.4 Peringkat Analisis

Sebuah peringkat analisa atau level analisis merupakan hal yang harus dicantumkan seorang peneliti dalam karya penelitian akademisnya. Dalam Hubungan Internasional peringkat analisa berfungsi untuk mengamati faktor – faktor dalam hubungan antar bangsa, dan variabel apa yang bisa digunakan dalam sebuah tingkatan analisis.²⁹ Rumusan masalah dalam penelitian ini mengindikasikan peran individu, yaitu George Bush, untuk melihat latar belakang nya dalam melanjutkan kebijakan

²⁹ Mas' oed, Mochtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta: LP3ES, 1990) Hal. 35

Pro Israel. Peran Bush sebagai pemegang kultur dominan dipandang peneliti signifikan. Hal ini dibuktikan dengan lobi nya pada negara – negara sekutu untuk memperkuat posisi kebijakan *War on Terror* dan koalisi globalnya. Pada tahun 2001 pasca peristiwa 11 September terjadi, George W. Bush memaksa Pakistan untuk menarik dukungannya terhadap Taliban dan toleransinya terhadap Al Qaeda.³⁰ Bush juga melarang West Bank menghentikan donor luar negeri untuk memperkuat Israel. Berdasarkan pembuatan kebijakan Pro Israel pada masa Herbert Bush dan Bill Clinton, terdapat indikasi bahwa George W. Bush melanjutkan kebijakan tersebut pasca peristiwa 11 September. Keputusan ini mengindikasikan bahwa George W. Bush merupakan aktor yang memutuskan adanya keberlanjutan kebijakan Pro Israel.

Mohtar Mas'ued menggolongkan peringkat analisa ke dalam lima bagian untuk memilah-milahnya menjadi lebih komprehensif. Lima kemungkinan peringkat analisa tersebut antara lain individu, kelompok individu, negara – bangsa, kelompok negara-negara dalam suatu region dan sistem global.³¹ Peneliti menggunakan peringkat analisa perilaku individu. Individu dalam hal ini George W. Bush yang diindikasikan menjadi *descicion maker* dalam kebijakan Pro Israel dipandang relevan karena kultur dominan keberlanjutan kebijakan Pro Israel terletak pada keputusan George W. Bush yang melanjutkan kebijakan tersebut pasca peristiwa 11 September. Keberlanjutan tersebut secara verbal terbukti dimuat dalam *Seal of The President of The United States* yang terbit pada bulan September tahun 2002.

³⁰ Cakmak, Cenap. *American Foreign Policy and September 11*. (Jstor Journal, 1990) Hal. 3

³¹ Mas'ued, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta: LP3ES, 1990) Hal. 40

Dalam menggunakan perilaku individu sebagai peringkat analisis, seorang peneliti beranggapan bahwa fenomena Hubungan Internasional merupakan hasil dari interaksi antar individu. Oleh karena itu peneliti harus mampu menelaah sikap dari tokoh utama pembuat kebijakan. Dalam penelitian ini, George Bush di klaim sebagai pemimpin yang melatarbelakangi dilanjutkannya kebijakan Pro Israel pasca peristiwa 11 September. Dalam peringkat analisa individu, peneliti harus menjelaskan sifat, karakter, nilai, dan interaksi George Bush dengan Israel yang membuatnya melanjutkan kebijakan Pro Israel pasca peristiwa 11 September. Secara logis Bush seharusnya menghentikan tendensi hubungannya dengan Timur Tengah terutama intervensinya dalam konflik arab Israel untuk minimal memperbaiki hubungannya dengan dunia arab.

Unit eksplanasi dari penelitian ini adalah peristiwa 11 September. Unit eksplanasi adalah obyek yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang akan digunakan atau disebut juga sebagai variabel independen.³² Dengan demikian, dalam melakukan penganalisaan masalah, unit analisa dan unit eksplanasi saling terkait. Sehubungan dengan penelitian ini, peristiwa 11 September merupakan hal yang mempengaruhi peningkatan intensitas dari kebijakan Pro Israel. Oleh karena itu, kebijakan Pro Israel dikategorikan sebagai variabel dependen.

³² Mas'ood, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta: LP3ES, 1994) Hal. 136

3.5 Sistematika Penulisan

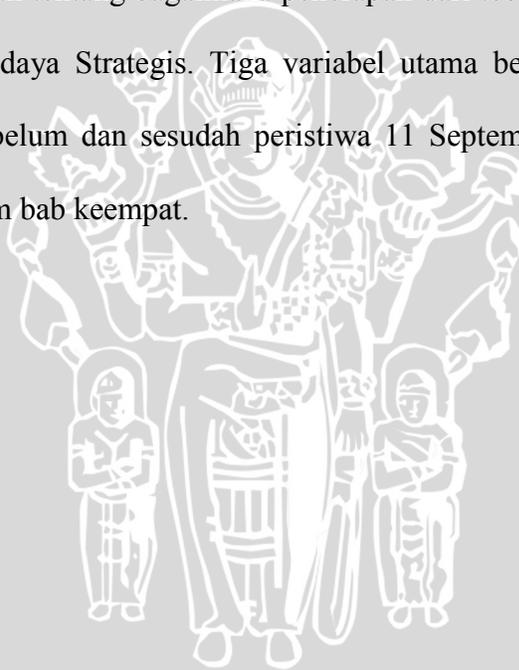
Penelitian ini terbagi ke dalam lima bab. Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian. Fungsi dari bab pertama adalah untuk menjelaskan tentang karakteristik kebijakan Pro Israel, serta apa yang membuat penulis menjadikan peristiwa 11 September sebagai pemicu dari peningkatan intensitas kebijakan tersebut. Di dalam bab pertama dijelaskan pula tentang pokok permasalahan yang menyebabkan peneliti merasa perlu untuk mengkaji permasalahan tersebut dan anomali yang ditimbulkan dari pokok permasalahan tersebut.

Bab kedua berisi tentang studi terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Studi terdahulu berfungsi sebagai pembanding penelitian terdahulu yang memiliki tema sejenis dengan penelitian ini. Studi terdahulu juga berfungsi sebagai bahan referensi dalam proses pengerjaan penelitian ini, sehingga peneliti dapat melengkapi atau membuat penelitian sejenis dengan paradigma dan perspektif yang berbeda.

Bab ketiga penelitian ini berisi tentang tinjauan metodologis seperti ruang lingkup penelitian, unit analisis dan unit eksplanasi, teknik pencarian data, dan sistematika penulisan. Tujuan dari bab ketiga adalah untuk menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan. Bab ketiga berfungsi untuk memperjelas rencana proses penelitian yang manfaatnya adalah untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Unit analisis dan unit eksplanasi merupakan

salah satu penjelasan penting yang ditampilkan di dalam bab ketiga untuk memberikan struktur penelitian yang jelas berkenaan dengan faktor apa yang mempengaruhi dan faktor apa yang dipengaruhi.

Bab keempat merupakan pembahasan sekaligus pembuktian hipotesis penelitian. Bab ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah sebagai pokok bahasan yang menjadi studi kasus dari penelitian. Di dalam pengerjaan bab keempat, peneliti perlu menjelaskan tentang bagaimana penerapan dari teori yang telah dipilih, dalam hal ini Teori Budaya Strategis. Tiga variabel utama beserta dinamika dari kebijakan Pro Israel sebelum dan sesudah peristiwa 11 September akan dijelaskan secara terperinci di dalam bab keempat.



BAB IV

INTENSITAS KEBIJAKAN PRO ISRAEL A.S OLEH GEORGE W. BUSH PASCA PERISTIWA 11 SEPTEMBER

4.1 Pengaruh Peristiwa 11 September Terhadap Intensitas Kebijakan Pro Israel

Pada tanggal 11 September tahun 2001 terjadi serangan terhadap gedung *World Trade Centre* dan Pentagon. Pemaknaan George W. Bush dalam peristiwa tersebut mempengaruhi pola tindakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Profesor Peter Berkowitz dalam studi kebijakannya yang berjudul “*Bush’s Foreign Policy & Neo-Conservative Ideology After September 11*” menyebutkan bahwa:

“President Bush is indeed a president of paradoxes. In 2000, he ran as a ‘uniter’ not as a ‘divider’, but his re-election produced one of the most bitterly-fought campaigns in memory. During his first campaign, he made his appeal as a compassionate conservative with the focus on domestic affairs and a modest policy yet, he became a wartime president.”³³

Berdasarkan pernyataan tersebut diperoleh indikasi bahwa terjadi ketimpangan antara tindakan George W. Bush perihal pemerintahannya dalam ranah domestik dan internasional. Bukti yang mendukung pernyataan Profesor Peter Berkowitz adalah respon tindakan “perang” secara global melawan terorisme oleh George W. Bush. Respon perang melawan terorisme secara global tersebut dimulai pada tanggal 7

³³ Berkowitz, Peter dalam Shain, Yossi. *Bush’s Foreign Policy & Neo-Conservative Ideology After September 11*. (London: Harold Hartog School of Government and Policy, 2005) Hal. 14

Oktober tahun 2001 di Afghanistan. Pasukan keamanan Amerika Serikat diperintahkan oleh Gedung Putih untuk menghancurkan infrastruktur basis militer di Afghanistan yang diindikasikan melaksanakan praktik paramiliterisasi.³⁴ Sehubungan dengan kebijakan Pro Israel, tindakan respon perang melawan terorisme secara global tersebut mempengaruhi tindakan militer yang akan dilakukan oleh rezim George W. Bush. Fakta yang membuktikan tentang respon perang terorisme global oleh George W. Bush akan dijelaskan ke dalam bagian sub bab berikutnya.

Sub bab ini sekaligus ditujukan untuk mengaplikasikan variabel *Causal Judgement* dalam Teori Budaya Strategis yang berbunyi rangkaian gejala yang mempengaruhi interpretasi seorang individu. Rangkaian gejala tersebut dapat diindikasikan melalui adanya sebuah peristiwa internasional atau sistem internasional yang mempengaruhi cara pandang dari seorang individu.³⁵ Sehubungan dengan kebijakan Pro Israel, maka variabel *Causal Judgement* digunakan untuk meneliti bagaimana peristiwa 11 September mempengaruhi cara pandang George W. Bush dalam mendefinisikan karakteristik dan definisi dari “ancaman” dan “aliansi”. Definisi karakteristik aliansi tersebut diindikasikan memperkuat intensitas kebijakan Pro Israel.

³⁴ International Council on Human Rights Policy. *Human Rights After September 11*. (Swiss: International Council on Human Rights, 2002) Hal. 13

³⁵ Lantiss, Jeffrey S. *Strategic Culture From Clausewitz to Constructivism*, (Jstor Journal, 2006) Hal. 38

4.1.1 Kebijakan Pro Israel Sebelum Peristiwa 11 September

Pembahasan tentang dinamika kebijakan Pro Israel sebelum peristiwa 11 September secara spesifik akan dibatasi berdasarkan dua rezim sebelum George W. Bush. Rezim yang pertama adalah Herbert Walker Bush atau lebih dikenal dengan Bush Senior selaku ayah dari George W. Bush. Penerapan kebijakan Pro Israel pada masa Herbert Walker Bush dipengaruhi oleh lima pilar kebijaksanaan. Rezim yang kedua adalah Bill Clinton. Di dalam rezim Bill Clinton, penerapan kebijakan Pro Israel bersifat lebih terlegitimasi sehingga landasan hukum hubungan bilateral antara Amerika Serikat semakin jelas pada masa pemerintahannya. Baik Herbert Walker Bush maupun Bill Clinton memiliki orientasi kepentingan yang berbeda disesuaikan dengan cara pandang sistem internasional yang berlaku pada masa pemerintahan masing – masing rezim.

Herbert Walker Bush sebagai ayah dari George W. Bush memiliki lima pilar kebijaksanaan (Five Pillar of Wisdom) setelah terjadi perang teluk. Pilar – pilar tersebut antara lain demokrasi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kapabilitas militer, keseimbangan teluk arab, dan perdamaian konflik Arab – Israel.³⁶ Pada masa tersebut, Amerika Serikat sedang mengalami gejolak politik akibat persaingan ideologis dengan Uni Soviet. Kebijakan Pro Israel pada masa Herbert Bush memimpin bukan merupakan manifestasi politik luar negeri Amerika Serikat yang paling dominan. Pilar kebijaksanaan A.S kelima yang berbunyi perdamaian konflik

³⁶ Shlaim. Avi. *The US and the Israeli – Palestinian Conflict* dalam Dunne, Tim dan Booth Ken, *Worlds in Collision: Terror and the Future of World Order*. (London: Palgrave Macmillan, 2002) Hal 2

Arab – Israel mengindikasikan bahwa hubungan bilateral antara Amerika dan Israel bersifat normatif dengan tidak mendiskreditkan kepentingan bangsa arab.

Pada masa pemerintahan presiden Bill Clinton, kebijakan Pro Israel dilanjutkan dengan menjadikan Israel sebagai pihak yang benar dalam konflik Arab – Israel. Menurut Avi Shlaim, Bill Clinton memanfaatkan berbagai macam perjanjian dan memorandum seperti Perjanjian Oslo, Camp David, hingga “Declarations of Principles on Palestina Self Government” untuk seolah – olah memfasilitasi pemerintahan otonom Palestina terhadap wilayah Gaza.³⁷ Pada kenyataannya, Israel tetap mendapatkan bantuan sebesar tiga milyar dolar A.S untuk pembiayaan deterritorialisasi wilayah Gaza.

4.1.2 Kebijakan Pro Israel Setelah Peristiwa 11 September

Kebijakan *War on Terror* merupakan salah satu tindakan untuk merespon peristiwa 11 September yang oleh Bush diklaim sebagai momentum ancaman terorisme internasional. Kebenaran tentang pelau peristiwa 11 September terhadap WTC dan Pentagon belum diketahui kepastiannya, namun dalam “*Seal of The President of The United States*” unit ketiga halaman ke empat, George W. Bush menyimpulkan fundamentalis muslim yang bermarkas di Afghanistan merupakan aktor yang harus bertanggung jawab. Keberlanjutan kebijakan Pro Israel merupakan salah satu tindakan yang disebutkan dalam halaman tersebut dan manifestasinya berupa bantuan baik dalam bentuk dukungan moril, militer, maupun finansial. Di

³⁷ *Ibid.* Hal 4

dalam “Seal of The President of The United States” yang diedarkan pada tahun 2002 tersebut, sama sekali tidak ditemukan data yang berkenaan dengan negosiasi antara Amerika Serikat dan Palestina. George W. Bush bahkan semakin mempererat hubungan diplomatik antara A.S dan pemimpin – pemimpun Yahudi Israel.

Tepat satu tahun setelah peristiwa 11 September terjadi, bersama dengan kabinet – kabinet nya di Gedung Putih, George W. Bush mengedarkan “*Seal of The President of The United States*” (keputusan resmi presiden) yang secara general menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang dilanda krisis keamanan yang diciptakan oleh negara kecil seperti Afghanistan. George W. Bush dalam keputusan resmi tersebut juga menyatakan bahwa kebebasan diartikan sebagai bebas dari ancaman terror. Berikut adalah salah satu pembukaan dari “Seal of The President of The United States” pada bulan September tahun 2002.³⁸

“Freedom is the non-negotiable demand of human dignity; the birthright of every person—in every civilization. Throughout history, freedom has been threatened by war and terror; it has been challenged by the clashing wills of powerful states and the evil designs of tyrants; and it has been tested by widespread poverty and disease. Today, humanity holds in its hands the opportunity to further freedom’s triumph over all these foes. The United States welcomes our responsibility to lead in this great mission”

Dikutip dari : Pembukaan halaman 4 “The National Security Strategy of the United States of America”.

Berdasarkan pembukaan halaman keempat dari “Seal of The President of The United States” tersebut, peneliti memiliki intepretasi bahwa karakteristik *freedom*

³⁸ Bush, George W, *The National Security Strategy of the United States of America*. (Washington : Gedung Putih, 2002) Hal. 1

(kebebasan) yang dimaksud oleh George W. Bush adalah bentuk kebebasan dari ancaman teror. Ancaman teror tersebut merupakan indikasi ajakan perang tidak hanya terhadap Bush sebagai kepala negara, namun sekaligus kepada seluruh warga Amerika Serikat. Definisi “musuh” oleh George Bush adalah teroris karena terorisme telah menyebarkan rasa “tidak aman” dan ajakan perang bagi konsep kedamaian.

Salah satu bukti tentang keputusan resmi George W. Bush untuk melanjutkan hubungan kerjasama antara Amerika Serikat dengan Israel dituangkan dalam unit ketiga Keputusan Presiden. Dalam unit ketiga disebutkan bahwa untuk menyebarkan paham demokrasi, perdagangan bebas, dan liberalisme Hak Asasi Manusia, Amerika Serikat akan memperkuat hubungan luar negerinya dengan negara kawan, organisasi multilateral, hingga organisasi keamanan. Salah satu bunyi dari unit ketiga yang bermaksud untuk memperkuat hubungan dengan Israel adalah “Dengan pengaruh yang kuat dari Amerika Serikat, kami memperkuat hubungan dengan kawan dan organisasi internasional termasuk aliansi setia Israel. Kami membuktikan bahwa terorisme adalah tindakan yang tidak terlegitimasi sehingga serupa dengan perbudakan, penjarahan, genosida, tidak adanya rasa hormat terhadap pemerintah, dan pertentangan yang labil.”³⁹ Pernyataan George W. Bush dalam unit ketiga paragraf enam tersebut membuktikan bahwa Bush melakukan klaim bahwa peristiwa 11 September tidak mempengaruhi hubungan antara Amerika Serikat dengan Israel. Klaim tersebut justru diperkuat dengan adanya keputusan resmi yang

³⁹ *Ibid.* Hal 6

diproduksi oleh Gedung Putih melalui persetujuan dari George W. Bush sebagai kepala negara.

Bukti lain yang menyatakan bahwa George W. Bush mewakili Amerika Serikat mendukung okupasi Israel terhadap Palestina yang tertuang dalam Keputusan Resmi Presiden adalah “Israel terbukti telah membuktikan kesuksesannya dalam men – demokrasi – kan Palestina, pemerintah Amerika Serikat dengan ini menyatakan bahwa pemimpin Israel diperintahkan untuk melanjutkan sistem demokrasi seperti yang dicontohkan oleh A.S berdasarkan langkah – langkah tertentu untuk mengubah Palestina menjadi lebih baik”.

Sebagai seorang presiden, George W. Bush memiliki pengaruh dalam mendefinisikan apa yang disebut ancaman dan siapa pelaku dari ancaman tersebut. Meskipun belum diketahui kebenaran pelaku dari peristiwa 11 September, George W. Bush telah menyimpulkan bahwa teroris fundamentalis muslim adalah pelakunya. Masih dalam Keputusan Resminya, George W. Bush menuangkan pernyataan bahwa akan melakukan support terhadap pemerintahan moderat dan moderen di negara – negara yang diindikasikan terdapat banyak pemeluk agama Islam, untuk menghindari berkembangluaskan paham fundamentalisme yang membentuk karakter teroris.⁴⁰ Salah satu bentuk bantuan untuk negara berpenduduk Muslim tersebut adalah dengan

⁴⁰ Bush, George W, *The National Security Strategy of the United States of America*. (Washington : Gedung Putih, 2002) Hal. 3

memberikan banyak beasiswa bagi pelajar yang berasal dari negara Islam, Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan tujuan beasiswa tersebut.⁴¹

Bukti lain yang menunjukkan bahwa George W. Bush melakukan klaim bahwa fundamentalis Islam merupakan kelompok yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa 11 September dilatarbelakangi oleh sifatnya yang mudah dikendalikan oleh situasi. Karakter *descision making* – nya cenderung tergesa – gesa dan sangat mudah memutuskan segala sesuatu secara instan. Pada bulan September tahun 2002, penasihat keamanan nasional A.S Condoleezza Rice memberikan informasi bahwa tim angkatan darat A.S di Afghanistan mengalami kekurangan Tim SAR serta belum cukup melakukan *capacity building* (salah satu bentuk lain gencatan senjata dengan tujuan melengkapi kebutuhan pra perang). George W. Bush tetap memerintahkan Condoleezza Rice untuk memandatkan pasukan darat A.S di Afghanistan untuk menyerang Afghanistan.⁴² Selain itu, sifat Bush yang tergesa – gesa dibuktikan oleh James Pfiffner melalui rekaman kalimat Bush yang berbunyi : “*Sometimes that’s the way I am – fiery*” yang berarti, “Begitulah caraku bekerja, berapi – api.⁴³” Dalam intepretasi bahasa, kata sifat berapi – api berarti bersemangat, menggebu – gebu, dan mengerjakan sesuatu hal dengan energi yang berlebihan.

George W. Bush dikenal memiliki banyak pernyataan yang kontroversial terkait keputusannya terhadap pemberantasan terorisme. Ia juga pernah mengatakan

⁴¹ The New York Times, *General Election of the United States*. (www.cwfa.org, diunduh pada tanggal 11 April 2012)

⁴² *Ibid.* Hal 219

⁴³ Terjemahan kamus Oxford, fiery : [adj.] berapi – api, menyala, atau pedas.

“Time is running out on Saddam Hussein. He must disarm. I’m sick and tired of games and deception. And that’s my view of timetables” dan “Any attempt to drag the process on for months will be resisted by the United States. . . . This just needs to be resolved quickly.”⁴⁴

Berdasarkan kedua pernyataan langsung George Bush diperoleh indikasi bahwa keputusan yang berkenaan dengan kebijakan *War on Terrorism* harus segera dilaksanakan dan harus segera ditindaklanjuti tanpa melalui proses yang matang. Colin Powell sebagai sekretaris negara yang menjabat saat peristiwa 11 September terjadi pernah mengusulkan kepada George W. Bush untuk mempertimbangkan resolusi PBB ke – 1441, yang berbunyi “Pemimpin negara yang tnegaranya bergabung dalam Dewan Keamanan PBB diwajibkan untuk melakukan konsultasi kepada PBB untuk memonitor kapasitas militer dan melakukan *capacity building* sebelum memutuskan perang”. Powell juga memberikan sejumlah data dari IAEA yang berisi bahwa IAEA belum dapat membuktikan kepemilikan senjata pemusnah massal seperti yang diduga oleh Bush selama ini.⁴⁵

Berdasarkan kolaborasi data di atas maka kita simpulkan bahwa peristiwa 11 September telah mengalihkan orientasi politik luar negeri Amerika Serikat dari yang semula berbunyi “*Land of Freedom and opportunity*” kepada “*To remain steadfast with our Ally Israel – The Homeland Security*”. Pasca peristiwa 11 September, George W. Bush mengeluarkan Keputusan Resmi Presiden di Gedung Putih pada bulan September tahun 2002 yang di dalamnya berisi klaim keterlibatan kaum

⁴⁴ Pfiffner, James P, *George W. Bush: Policy, Politics, Personality.*(New York: George Mason University Press, 2003) Hal. 197

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 165

fundamentalis Islam dalam peristiwa 11 September yang dilatarbelakangi oleh sifat George W. Bush yang cenderung tergesa – gesa dalam memutuskan sebuah kebijakan militer yang berkenaan dengan *War on Terrorism*. Sifat Bush tersebut telah mendorong terjadinya invasi terhadap Irak dan penyerangan terhadap Afghanistan sehingga hubungan dengan Israel dipertahankan untuk menyebarkan paham demokrasi di Palestina.

4.2 Dominasi Peran George W. Bush Dalam Kebijakan Pro Israel

Di dalam kesatuan sistem demokrasi Amerika Serikat, Presiden dan Kongres memiliki peran yang berbeda dalam penentuan dan proses dari hubungan diplomatik antar negara. Presiden sebagai badan eksekutif negara bertugas untuk menentukan negara mana saja yang perlu ditingkatkan hubungan diplomatiknya. Meskipun demikian, proses pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan interaksi antar negara di Amerika Serikat harus mendapatkan persetujuan dari *National Security Council* yang tugas utamanya untuk menentukan tindakan pemerintah Amerika Serikat secara umum dalam melakukan hubungan diplomatik antar negara.⁴⁶ Meskipun demikian, George W. Bush diindikasikan mejadi individu yang memegang kultur dominan dari intensitas kebijakan Pro Israel. Indikator tersebut didapatkan dari adanya ketimpangan antara legitimasi hukum yang mendasari tentang wewenang penentu proses pembuatan kebijakan dan tindakan dari George W. Bush sebagai badan eksekutif negara.

⁴⁶ DeJarnette, Larry N. *Pro Israel Interest Groups And The Formulation of US Foreign Policy For Midle East*. (Port Royal: National Technical Information Service, 2005) Hal. 13

Dalam mengetahui siapa yang memegang kultur dominan dalam kebijakan Pro Israel, peneliti harus menjelaskan proses pembuatan kebijakan secara terlegitimasi dalam tubuh pemerintahan. Secara umum sistem pemerintahan Amerika Serikat terbagi ke dalam tiga konstitusi. Pertama, kongres sebagai lembaga legislatif yang beranggotakan “*House of Representative*” dan senat. Kedudukan senat lebih tinggi dibandingkan dengan *House of Representative* karena senat memiliki wewenang untuk menyetujui perjanjian internasional dan pengangkatan penting seperti hakim agung dan duta besar.⁴⁷ Kedua, lembaga eksekutif yang berisi presiden dan wakil presiden. Ketiga, lembaga yudisial yang beranggotakan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan penafsir utama dari undang – undang dasar sehingga kedudukannya lebih tinggi dibandingkan badan legislatif maupun badan eksekutif.⁴⁸

Artikel II dalam Undang – Undang Konstitusi Amerika Serikat, menyebutkan bahwa “*The legislature is clearly superior to the executive in the formulation of public policy*”, berdasarkan pernyataan tersebut diperoleh indikasi bahwa secara terlegitimasi, George W. Bush sebagai badan eksekutif tidak memiliki wewenang untuk menentukan rangkaian proses pembuatan kebijakan.⁴⁹ Partisipasi kongres dalam kebijakan luar negeri terbagi menjadi dua hal. Pertama memiliki otoritas untuk merekomendasikan resolusi kepada badan eksekutif. Kedua, memiliki otoritas untuk

⁴⁷ Budiardjo, Miriam Prof. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) Hal.278

⁴⁸ *Ibid*. Hal. 280

⁴⁹ Pfiffner, James P. *George W. Bush as Chief Executive*. (London: Edinburgh University Press, 2009) Hal. 5

menentukan kepada siapa badan eksekutif harus tunduk dan dalam perjanjian tertentu.⁵⁰

Pada kenyataannya peneliti menemukan sejumlah data berkaitan dengan ketimpangan antara perilaku George W. Bush sehubungan dengan proses intensitas kebijakan Pro Israel, dengan hukum yang berlaku dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat. Pertama, pada tahun 2001 politik luar negeri Amerika Serikat berdasarkan keputusan kongres tunduk kepada keputusan dari Konvensi Jenewa yang salah satunya berbunyi pembatasan kapasitas militerisasi untuk tujuan perang.⁵¹ Meskipun demikian instrumen kebijakan *War on Terror* tetap dilaksanakan dan bantuan militer dan persenjataan kepada Israel tetap diberlakukan. Sejak tahun 1996 kongres dan senat menyetujui jenis bantuan berupa program dan bantuan ekonomi kepada Israel, misalnya pembangunan sekolah, rumah sakit, dan bantuan operasional sebesar 1,5 milyar dolar.⁵² Meskipun demikian George W. Bush mengusulkan tambahan bantuan militer berupa 40 armada udara, nuklir Hawk, nuklir Stingler, dan beberapa mesin pertahanan untuk meminimalisir kemungkinan ancaman dari negara arab kepada Israel.⁵³ Usulan bantuan militer tersebut menjadi timpang terhadap peraturan Konvensi Jenewa, yang dipatuhi oleh senat dan kongres. Kedua, meskipun tidak memiliki otoritas, George W, Bush memerintahkan *National Security Agency* yang merupakan lembaga keamanan nasional yang bertugas untuk memberikan

⁵⁰ DeJarnette, Larry N. *Pro Israel Interest Groups And The Formulation of US Foreign Policy For Middle East*. (Port Royal: National Technical Information Service, 2005) Hal. 14

⁵¹ *Ibid.* Hal. 5

⁵² Mark, Clyde R. *Israeli-United States Relations*. (US Capitol: CRS Issue Brief for Congress) Hal. 15

⁵³ *Ibid.* Hal. 17

jaminan keamanan domestik di Amerika Serikat (NSA), untuk mengawasi sekaligus memonitor jaringan telepon dan transmisi dari Amerika Serikat ke negara – negara asing untuk mengetahui aktivitas teror dalam negeri. Walaupun NSA melaksanakan mandat George W. Bush, secara hukum George W. Bush juga perlu memberikan laporan terlebih dahulu kepada kongres untuk dilaporkan kepada *Foreign Intelligence Surveillance Act* (FISA) yang merupakan lembaga keamanan asing yang bertugas untuk memberikan ijin monitor sarana telekomunikasi Amerika Serikat.

Berdasarkan ketimpangan peraturan tersebut diindikasikan bahwa George W. Bush melanggar ketentuan proses pembuatan keputusan yang terlegitimasi dalam badan konstitusi Amerika Serikat.

Berdasarkan kedua bukti utama tentang ketimpangan proses pembuatan keputusan dalam badan konstitusi Amerika Serikat, diperoleh kesimpulan bahwa secara legitimasi, George W. Bush bukan merupakan penentu utama dari kebijakan Pro Israel, namun kultur dominan berupa dukungan kepada Israel meskipun terjadi peristiwa 11 September, menjadikan George W. Bush sebagai individu yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan intensitas kebijakan Pro Israel.

4.3 Pengaruh Penasihat George W. Bush Terhadap Kebijakan Pro Israel

Secara khusus sub-bab ini akan membahas tentang penjabaran data tentang pengaruh lingkungan pemerintahan yang melingkari George W. Bush. Sub bab ini sekaligus digunakan untuk mengaplikasikan variabel kedua dari Teori Budaya

Strategis *Cognitive Mapping* yang berbunyi hubungan antara aksioma kausal tertentu terhadap tindakan individu.⁵⁴ Definisi dari hubungan antara aksioma adalah pengaruh dari individu atau kelompok yang menanamkan pemahaman tentang sebuah konsep tertentu kepada seorang individu. Berkaitan dengan intensitas kebijakan Pro Israel maka terdapat adanya indikasi penanaman nilai dan norma dari sekelompok individu yang mempengaruhi George W. Bush untuk meningkatkan intensitas kebijakan Pro Israel. Meskipun secara hukum George W. Bush bukan aktor yang sah untuk menerbitkan kebijakan Pro Israel, peneliti dapat melihat proses kebijakan tersebut berdasarkan lingkungan pemerintah yang melingkupi George W. Bush.

Ketika masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, George W. Bush sebagai eksekutif tidak bekerja secara independen. George W. Bush dikelilingi oleh sejumlah tokoh pro Yahudi di Gedung Putih. Berdasarkan data yang dimiliki peneliti, beberapa advisor atau penasihat keamanan di Gedung Putih banyak yang didengar nasihatnya oleh Bush sehingga terdapat kemungkinan keterlibatannya dalam keputusan keberlanjutan kebijakan Pro Israel. Peran penasihat kepada badan eksekutif secara hukum penting. Di dalam Undang – Undang telah diatur bahwa berdasarkan konsultasi dengan Senat, badan eksekutif memiliki hak untuk memilih staff – staff pribadi, penasihat, dan agen spesial, tanpa melalui persetujuan dari Kongres. Kedudukan penasihat adalah penting bagi Presiden karena wewenang penasihat untuk melakukan negosiasi perjanjian dan hubungan diplomatik antar bangsa di Amerika

⁵⁴ Johnston, Alastair, *Thinking About Strategic Culture* (Jstor Journal : *International Security* vol. 19 no. 4 Spring, 1995) Hal. 56

Serikat.⁵⁵ Penasihat presiden juga akan dimintai pertanggungjawaban sehubungan dengan manifestasi politik antar bangsa dan kebijakan luar negeri dari Amerika Serikat yang merupakan mandat dari badan eksekutif.

Berikut ini adalah nama – nama penasihat George W. Bush yang diindikasikan memiliki pengaruh dalam intensitas kebijakan Pro Israel. Pertama, Collin Powell adalah sekretaris negara yang lahir di kota New York dalam lingkungan Yahudi.⁵⁶ Powell dimandatkan oleh Bush sebagai sekretaris negara sekaligus penasihat dalam kebijakan AS di Timur Tengah, terutama Irak. Sebuah situs resmi biografi staff Gedung Putih menyebutkan, Powell menyarankan kepada Bush untuk mempererat kerjasama dengan Israel dan membangun Irak kembali setelah rezim Saddam Hussein.⁵⁷ Powell lahir dan dibesarkan di lingkungan Yahudi dan dapat berbicara bahasa Yiddish, dalam analisis psikopolitik hal ini tentu mempengaruhi empatinya terhadap masyarakat Yahudi, yang dibuktikan dengan dukungannya pada tahun 2002 untuk melanjutkan kebijakan Pro Israel dengan cara sepenuhnya memberikan bantuan FMF (bantuan pembiayaan dana militer). George W. Bush pada tahun 2003 mendengarkan saran Powell untuk membangun kembali Irak melalui dukungan internasional agar biaya invasi Irak tidak membengkak pada persenjataan. Besarnya pengaruh nasihat Powell terhadap tindakan politik luar negeri

⁵⁵ DeJarnette, Larry N. *Pro Israel Interest Groups And The Formulation of US Foreign Policy For Midle East*. (Port Royal: National Technical Information Service, 2005) Hal. 13

⁵⁶ Collin Powell, *The Unauthorized Biography* (<http://holywar.org>, diunduh pada tanggal 14 Maret 2012)

⁵⁷ Colin Powell, *The Unauthorized Biography* (www.biography.com, diunduh pada tanggal 9 April 12)

Amerika Serikat ini membuat peneliti meyakini adanya kemungkinan pengaruh Powell dalam keputusan keberlanjutan kebijakan Pro Israel oleh George W. Bush.

Kedua, Elliot Abrams merupakan penasihat Dewan Keamanan Nasional yang bekerja untuk Gedung Putih sejak pemerintahan Presiden Ronald Reagan. Abrams merupakan salah satu staff Gedung Putih yang mengklaim dirinya pro Yahudi, terutama Yahudi Israel. Hal ini dibuktikan dengan partisipasinya dalam mengorganisir sebuah komunitas pers yang khusus memberitakan tentang perkembangan muda mudi Yahudi di Amerika Serikat.⁵⁸ Laporan tentang perkembangan muda mudi Yahudi di Amerika Serikat tersebut digunakan George W. Bush untuk memantau aktivitas berbasis keagamaan di A.S. George W. Bush sering mengadakan diskusi dengan Abrams tentang rasionalisasi biaya untuk alokasi bantuan ekonomi terhadap Israel. Berdasarkan intensitas diskusi itulah, peneliti juga meyakini bahwa Elliot Abrams merupakan salah satu staff kongres yang berpengaruh terhadap pola pengambilan keputusan Bush.

Ketiga, Robert Satloff adalah penasihat Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat yang merupakan asisten dari Martyn Indik, penggagas kebijakan Pro Israel pertama kali. Beliau merupakan direktur eksekutif grup lobi Israel yang bernama "Think Tank". Bersama Martyn Indik, Satloff merupakan salah satu penggagas keberlanjutan kebijakan Pro Israel dan bertugas mengatur alokasi dana West Bank

⁵⁸ Elliot Abrams, *The Unauthorized Biography* (www.biography.com, diunduh pada tanggal 9 April 12)

sejak pemerintahan Bill Clinton hingga Bush. George W. Bush mempercayakan mekanisme dan dinamika West Bank terhadap Satloff.

Keempat, Steve Goldsmith sebagai penasihat khusus Yahudi domestik George W. Bush yang berinisiatif memberikan servis berbasis agama di Gedung Putih. Servis keamanan internasional Amerika Serikat berbasis perlindungan terhadap Yahudi Israel dan Yahudi domestik Amerika Serikat merupakan salah satu output kebijakan George W. Bush yang dipengaruhi oleh nasihat dari Goldsmith. Goldsmith juga merupakan teman dekat dari Ehud Olmert, walikota Yerusalem, Israel. Berdasarkan indikator dukungan terhadap gerakan kepentingan Pro Israel dan sikap dari Goldsmith yang cenderung pro Yahudi maka dapat disimpulkan bahwa beliau diindikasikan memiliki empati yang kuat terhadap kebijakan Pro Israel.

4.4 Analisis Simbolik Perilaku George W. Bush

Sub – bab ini merupakan penerapan variabel ketiga dari Teori Budaya Strategis *Symbol Analysis* yang berbunyi rangkaian tindakan sebagai akibat dari *Causal Judgement* dan *Cognitive Mapping*. Setelah melalui penjabaran tentang pengaruh dari peristiwa 11 September dan pengaruh otoritas penasihat badan eksekutif, peneliti akan berusaha untuk membandingkan antara jargon – jargon politik yang sering diucapkan oleh George W. Bush yang berkenaan langsung dengan indikasi sikap dan perilaku psiko politiknya. Sebelum peristiwa 11 September terjadi, George W. Bush menggambarkan Amerika Serikat sebagai negara yang bebas,

menghargai pendapat, adil, tidak memihak dan menghargai hak asasi manusia yang diperkuat dengan jargonnya yang berbunyi “*United States is land of freedom and opportunity*”. Jargon tersebut dibuktikan dengan luasnya akses media massa dalam memberitakan dinamika kepresidenan yang diterbitkan dalam jurnal internasional seperti *The Washington Globe* yang berisi dinamika hasil pemerintahan, situs www.cwfa.org merupakan salah satu situs internet yang dapat diakses bebas oleh masyarakat untuk mengetahui sejauh mana Gedung Putih merespon sebuah kasus internasional. Pasca peristiwa 11 September, George W. Bush muncul dengan pernyataan “*To remain steadfast with our ally Israel*”. Jargon tersebut dapat dibuktikan dengan tindakan Bush yang mulai mengurangi akses media massa terhadap pemerintahan, misalnya dalam hal transparansi alokasi dana militer.

Ada beberapa hal simbolis yang mengindikasikan keberlanjutan kebijakan Pro Israel dalam tindakan politik George W. Bush. Pertama, kunjungan konstan dan kedekatan hubungan interpersonal antara George W. Bush dengan pemimpin – pemimpin Israel. Berikut adalah tabel kegiatan George W. Bush pasca peristiwa 11 September terjadi:

Tabel 2 : Kegiatan George W. Bush Pasca Peristiwa 11 September

Tanggal	Kegiatan
14 September 2001	George W. Bush dan tim diplomat A.S meninggalkan sebuah rapat di Durban yang mengindikasikan adanya rasisme terhadap gerakan Zionisme di Israel. Berdasarkan tindakan tersebut diperoleh adanya indikasi bahwa George W. Bush merasa kurang menyetujui sikap pemimpin rapat yang

	cenderung mendiskreditkan eksistensi Zionisme di Israel. Hal ini menunjukkan bahwa George W. Bush dan tim diplomat A.S mendukung gerakan Zionisme Israel sehingga tidak ada pertanda yang menunjukkan kebijakan Pro Israel pasca peristiwa 11 September harus dihentikan.
1 November 2001	Kuasa hukum Jenderal John Ashcroft mengadakan pertemuan dengan Ketua Kelompok “ <i>American Jewish</i> ” untuk membahas adanya teror terhadap kelompok tersebut. Teror tersebut ditujukan kepada kelompok “ <i>American Jewish</i> ” pasca peristiwa 11 September terjadi dan George W. Bush setuju untuk memfasilitasi pertemuan tersebut. Peneliti menangkap adanya indikasi bahwa George W. Bush memiliki hubungan yang baik dengan kelompok Yahudi A.S.
2 Desember 2001	Presiden Bush menyambut kedatangan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon di Gedung Putih. Sambutan baik dan jamuan yang ramah menunjukkan pola diplomatik tidak langsung oleh George W. Bush yang mengindikasikan bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Israel baik.
7 Desember 2001	Presiden George W. Bush mengirimkan kartu ucapan Hanukkah bagi personel Gedung Putih yang berbunyi “ <i>It is a holiday of hope that encourages trust in God’s providence and God’s purposes, even when we are threatened by darkness and destruction</i> ”. Kosa kata <i>darkness</i> (kegelapan) dan <i>destruction</i> (kerusakan) diasumsikan sebagai kondisi Amerika Serikat pasca peristiwa 11 September.
10 Desember 2001	Presiden Bush bertemu dengan 22 orang yang berpengaruh dalam komunitas Yahudi di ruang Roosevelt, Gedung Putih dan bersama – sama merayakan hari Hanukkah bersama dengan Laura Bush dan staff Gedung Putih. Pemupukan hubungan diplomatik inter personal seperti ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya empati sosial George W. Bush terhadap nasib seluruh Yahudi di dunia, termasuk Israel.

Dikutip dari : anonim, *President George W. Bush A Friend of American Jewish Community* (New York: www.hinari.org, diunduh pada tanggal 12 April 2012) Hal. 8

Data tentang kedekatan George W. Bush dengan komunitas Yahudi di Amerika Serikat dan pertemuannya dengan pemimpin pemimpin besar Israel tidak

hanya membuktikan bahwa George W. Bush adalah presiden A.S yang memiliki pengaruh dalam keberlanjutan kebijakan Pro Israel, namun juga untuk mempertegas bahwa secara simbolik, zionisme dan paham Yahudi tidak mengurangi intensitas keputusan Presiden Bush dalam memberikan “keleluasaan” bagi Israel untuk melakukan okupasi terhadap Palestina.

Jargon – jargon politik George W. Bush pada umumnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi politik Amerika Serikat saat itu. Analisis simbolik ini sekaligus membuktikan karakter Bush yang mudah dikendalikan oleh situasi. Parameter “Bebas” dan “Ancaman” bagi Amerika Serikat menjadi fluktuatif di tangan George W. Bush. Dalam kampanye kepresidenannya pada tahun 2000, jurnalis Jeremy M. Sharp merekam pernyataan George. W. Bush yang berbunyi:

“There’s more to do. Freedom in the Land of United States means free from job – lacking. More to make sure America is jobfriendly and America’s workplaces are family-friendly. To keep American jobs in America, regulations should be reasonable and fair. Freedom in the Land of United States also means free from health troubles.”⁵⁹

Dalam pernyataan saat kampanye tersebut manifestasi kebijakan politik George W. Bush yang mengarah kepada definisi “*freedom*” ditekankan dalam level servis sosial, misalnya dalam hal ini kesehatan dan kesempatan kerja. Setelah peristiwa 11 September terjadi pada kenyataannya jargon tersebut tidak terbukti, Rick Pollack seorang pengamat dinamika servis kesehatan di Amerika Serikat menyebutkan bahwa bantuan pemerintah sebesar 60 juta dollar A.S tidak segera

⁵⁹ Sharp, Jeremy M, *US Foreign Policy to Israel : Unit Social Services* (www.library.nu, diunduh pada tanggal 2 Januari 2012) Hal 219

dialokasikan. Dana tersebut dimaksudkan untuk membangun rumah sakit – rumah sakit di daerah provinsi dan pinggiran Amerika Serikat di bawah pengawasan lembaga Medicare⁶⁰. Tanpa adanya konfirmasi dari pihak kongres, alokasi dana tersebut tidak lagi diberitakan kejelasannya oleh media Amerika Serikat.

Pasca peristiwa 11 September, Bush memberikan pernyataan kepada media massa yang berbunyi:

“Our Nation’s cause has always been larger than our Nation’s defense. We fight, as we always fight, for a just peace—a peace that favors liberty. We will defend the peace against the threats from terrorists and tyrants. We will preserve the peace by building good relations among the great powers. And we will extend the peace by encouraging free and open societies on every continent.”⁶¹

Pernyataan tersebut diberikan di West Point untuk menunjukkan orientasi definisi “freedom” dalam hal “liberty” yang biasa diucapkan oleh Bush saat memberikan pernyataan kepada media massa.

4.5 Generalisasi Analisis

Dalam subbab sebelumnya yang membahas tentang lingkungan – lingkungan yang melingkupi George W. Bush didapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, George W. Bush merupakan aktor yang kultur dominannya terindikasi meningkatkan intensitas hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Israel. Meskipun secara hukum George W. Bush bukan merupakan aktor sah dalam memutuskan sebuah manuver kebijakan luar negeri, namun terdapat beberapa indikator ketimpangan

⁶⁰ Fong T, Loos R. *Balancing Act: Bush Budget Reveals Healthcare Funding Priorities*. (www.ebscohost.com, diunduh pada tanggal 18 April 2012)

⁶¹ Bush, George W. 2002. *The National Security Strategy of United States of America*. Washington: Laporan Doktrin Kepresidenan.

hukum dengan perilaku dari George W. Bush sehubungan dengan kebijakan Pro Israel. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh penghirauan otoritas senat yang dibuktikan melalui penghirauan George W. Bush terhadap keputusan Konvensi Jenewa perihal bantuan militer terhadap Israel.

Kedua, di lingkungan Gedung Putih, sosok George W. Bush terbilang dekat dengan baik aktivitas, maupun lingkungan pemeluk agama Yahudi. Collin Powell, Elliot Abrams, Douglas Feith, hingga Mel Sembler merupakan sebagian dari kabinet sekaligus advisor politik George W. Bush yang memeluk agama Yahudi. George W. Bush pada kenyataannya, pasca peristiwa 11 September masih mengadakan kegiatan pertemuan dengan kelompok *American Jewish* bersama kuasa hukum Jenderal John Ashcroft untuk membahas tentang ada teror dari pelaku yang tidak teridentifikasi. Pertemuan – pertemuan dengan elit negara Israel seperti Ariel Sharon untuk bersama – sama merayakan hari raya Hanukkah. Peneliti berasumsi bahwa banyaknya aktor – aktor Yahudi di lingkungan pemerintahan George W. Bush menimbulkan empati yang membuat George Bush kembali melanjutkan kebijakan Pro Israel.

Ketiga, keberlanjutan kebijakan Pro Israel pasca peristiwa 11 September dipengaruhi oleh aspek psikologis George W. Bush yang seringkali tergesa – gesa dan mudah dikendalikan oleh situasi yang berhubungan langsung dengan keamanan nasional Amerika Serikat. Ketergesa – gesaan tersebut dicerminkan dalam keputusannya untuk melakukan penyerangan terhadap Afghanistan pada tahun 2002 meskipun penasihat keamanan nasionalnya, Condoleezza Rice mengingatkan tentang

kekurangan pasukan A.S dalam hal *capacity building*. Bukti lain yang menyatakan kondisi emosional George W. Bush adalah keputusannya untuk tidak berkonsultasi dengan Dewan Keamanan PBB seputar tindakan invasi ke Irak, nyatanya IAEA pada masa itu disebutkan oleh Collin Powell belum dapat menemukan bukti bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal.

Keempat, adanya perubahan indikasi "*freedom*" dan "*liberty*" yang dicerminkan dalam perubahan jargon politik George W. Bush dan dicerminkan dalam Keputusan Presiden Resmi yang terbit pada tahun 2002 bulan September tepat satu tahun untuk menindaklanjuti peristiwa 11 September. Sebelum peristiwa 11 September terjadi "*freedom*" oleh George W. Bush dicerminkan dalam pernyataan:

"...freedom in the Land of United States means free from job – lacking. More to make sure America is jobfriendly and America's workplaces are family-friendly. To keep American jobs in America, regulations should be reasonable and fair..."

Dari pernyataan tersebut arti kebebasan dimanifestasikan oleh George W. Bush sebagai kebebasan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial. Pasca peristiwa 11 September "*freedom*" dicerminkan sebagai kebebasan dari ancaman dari terorisme yang dicerminkan dalam pernyataan "*We fight, as we always fight, for a just peace— a peace that favors liberty. We will defend the peace against the threats from terrorists and tyrants*". Penyerangan terhadap Afghanistan dan Irak merupakan bukti bahwa "ancaman" dari "teroris" yang didefinisikan oleh George W. Bush adalah berasal dari dunia fundamentalis Islam. Palestina merupakan salah satu negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, maka perubahan indikasi kebebasan tersebut

merupakan salah satu indikator yang mendorong George Bush untuk “menantang” pemimpin Israel untuk semakin giat mempenetrasi nilai demokrasi di Palestina.

Keempat penjelasan faktor pendorong tindakan George W. Bush tersebut merupakan hasil aplikasi ketiga variabel Teori Budaya Strategis yaitu *Causal Judgement* yang berisi pemetaan serangkaian gejala dan hubungan antar perilaku George W. Bush, *Cognitive Mapping* yang berisi perilaku dan tindakan hasil dari pemetaan rangkaian gejala, dan *Symbol Analysis* yang dipergunakan untuk mempergunakan elemen teks dan simbol untuk melihat orientasi tindakan George W. Bush⁶². Keempat faktor pendorong tindakan George W. Bush di atas sekaligus untuk menjawab rumusan masalah yang berbunyi “Apa yang menyebabkan George W. Bush melanjutkan kebijakan Pro Israel?”. Kelima faktor pendorong tersebut merupakan hal – hal yang melingkupi dan mempengaruhi George W. Bush dalam mengambil keputusan seputar kebijakan luar negerinya dengan Israel.

Berdasarkan pengaplikasian ketiga variabel Teori Budaya Strategis dan penjabaran hipotesis dalam bab III penelitian, diperoleh jawaban atas hipotesis sebagai berikut:

Tabel 3 : Tabel Pembuktian Hipotesis

No	Hipotesis	Hasil penelitian	Indikator
1.	George W. Bush sebagai pemilik kultur	George W. Bush merupakan pembuat	Ketimpangan antara hukum

⁶² Lantis, S. Jeffrey, *Strategic Culture From Clausewitz to Constructivism* (London : Jstor Journal, 2004) Hal 7

	dominan dalam keberlanjutan kebijakan Pro Israel	keputusan tentang dilanjutkan kebijakan Pro Israel pasca peristiwa 11 September	yang berlaku dengan tindakan.
2.	George W. Bush dipengaruhi oleh elemen – elemen domestik dalam pemerintahannya	George W. Bush dekat dengan sejumlah staff Gedung Putih beragama Yahudi dan dekat dengan perkumpulan Yahudi Amerika.	Pertemuan George Bush yang intens dengan perdana menteri Israel serta forum – forum Yahudi Amerika
3.	Terjadi pergeseran kepentingan domestik demi kepentingan politik internasional A.S dalam kebijakan Pro Israel.	Terjadi perubahan indikator “ <i>freedom</i> ” dan “ <i>liberty</i> ” dalam jargon politik George W. Bush	Berkurangnya servis sosial dan kepentingan domestik yang digeser oleh kepentingan keamanan internasional
4.	Karakter pemerintahan George W. Bush cenderung defensif.	George W. Bush merupakan sosok yang mudah dikendalikan oleh situasi yang berhubungan dengan terorisme, karakter pengambilan keputusannya cenderung tergesa - gesa	Keputusan Resmi Presiden bulan April tahun 2002

4.6 Keberlangsungan Kebijakan Pro Israel Pada Pemerintahan Barrack Obama

Setelah George W. Bush digantikan oleh presiden Barrack Obama, kebijakan Pro Israel tetap berlangsung dan hubungan antara Amerika Serikat dengan Israel justru semakin diperkuat. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Barrack Obama sendiri yang berbunyi “*Israel is one of America’s most important allies. America’s*

*fully supporting Israel democracy and emphasize our commitment to Israel security.*⁶³”, pernyataan tersebut dilanjutkan dengan menunjuk George Mitchell untuk memoderatori pertemuan antara pemerintah A.S dengan pemerintah Israel di kongres. Pertemuan tersebut ditujukan untuk membahas keberlanjutan kebijakan Pro Israel yang diagendakan dengan nama “*Redefining the Pro Israel Policy*” bersama Ben Ami dan Benyamin Netanyahu.⁶⁴

Dengan adanya keberlanjutan kebijakan Pro Israel sebagai agenda, Barack Obama terbukti juga melanjutkan agenda *War on Terrorism* oleh George W. Bush. Dalam pidatonya di Gedung Putih pada bulan Maret tahun 2009, Barack Obama menyatakan:

*“And we will use all elements of our national power to defeat al Qaeda, and to defend America, our allies, and all who seek a better future. Because the United States of America stands for peace and security, justice and opportunity. That is who we are, and that is what history calls on us to do once more.”*⁶⁵

Salah satu agenda selain melanjutkan kinerja George W. Bush dalam kebijakan Pro Israel, Barack Obama juga mengagendakan untuk melindungi Pakistan dari kemungkinan serangan dari Al – Qaeda. Menurut Obama kedekatan wilayah geopolitik antara Afghanistan dan Pakistan dapat mempengaruhi keamanan wilayah tersebut sehingga perlu diadakan konsultasi antara NATO, A.S, dan

⁶³ Rynhold, Jonathan, *President Obama And The Middle East Challenge*. (New York : BESA Centre Perspective Papers no. 50, www.biu.ac.il, diunduh pada tanggal 10 Mei 2012) Hal. 2

⁶⁴ Traub, James. *The New Israel Lobby* (New York: New York Times edisi September 2009) Hal 1

⁶⁵ Obama, Barack. *Remarks by President On A New Strategy for Afghanistan and Pakishtan*. (Washington: Gedung Putih, 2009) Hal 2

pemerintah Pakistan sendiri. Hal ini membuktikan bahwa pasca George W. Bush, orientasi tindakan pemerintah Amerika Serikat masih berpusat pada agenda keamanan internasional dibandingkan dengan servis sosial domestik yang memadai.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Persekutuan bilateral antara Amerika Serikat dengan Israel bukan merupakan isu baru dalam Hubungan Internasional. Sebuah anomali yang ditawarkan oleh penelitian ini terletak pada analisis simbolik yang membuktikan adanya perbedaan indikasi kebebasan dalam pernyataan George W. Bush. Peristiwa 11 September merupakan titik perhatian khusus yang dianggap penulis telah mengubah orientasi kebebasan yang dimaksud oleh George W. Bush sebagai presiden yang menjabat saat itu. Penelitian ini bergerak dalam level analisis individu sehingga Teori Budaya Strategis dipandang penulis sebagai “pisau” analisis yang paling tepat.

Kebijakan Pro Israel pada kesimpulannya mengalami peningkatan intensitas yang dipengaruhi oleh peristiwa 11 September dan pengaruh lingkungan penasihat badan eksekutif. Indikator peningkatan intensitas tersebut diperoleh dari ketimpangan antara manifestasi politik domestik George W. Bush dengan politik luar negerinya yang mengakibatkan respon perang global melawan terorisme. Dinamika kebijakan Pro Israel sendiri terletak pada tiga tingkatan rezim. Pada rezim Presiden Herbert Walker Bush kebijakan Pro Israel digagas, walaupun belum ditemukan landasan hukumnya, berdasarkan lima pilar kebijaksanaan yang salah satunya berisi tentang perdamaian konflik arab Israel. Kedudukan kebijakan Pro Israel dipandang normatif

karena tidak terdapat indikasi tentang dukungan penuh terhadap kepentingan Israel terhadap wilayah Gaza. Pada rezim Presiden Bill Clinton ranah kebijakan Pro Israel mulai terlegitimasi dan sah secara hukum dengan landasan perjanjian internasional. Kedudukan Amerika Serikat terhadap Pro Israel lebih berorientasi kepada dukungan memihak kepada Israel. Pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush, kedudukan kebijakan Pro Israel merupakan tindak lanjut dari respon terhadap peristiwa 11 September. Dalam hal ini peristiwa 11 September merupakan indikator utama adanya peningkatan intensitas kebijakan Pro Israel pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush

Pengaplikasian Teori Budaya Strategis untuk level analisis individu merupakan hal yang cukup rancu. Analisis simbolik yang membuktikan bagaimana indikasi “*liberty*” dan “*freedom*” dalam beberapa jargon politik George W. Bush sebelum dan sesudah peristiwa 11 September merupakan salah satu metode yang dipergunakan untuk melihat sejauh mana efek psikologis seorang *descicion maker* bermain. Peneliti telah membuktikan bahwa terdapat lima aspek yang mempengaruhi tindakan George W. Bush dalam memutuskan berlanjutnya kebijakan Pro Israel. Kelima pengaruh tersebut antara lain dominasi George W. Bush sebagai penggagas strategi, lingkungan domestik pemerintahan, lingkungan keluarga, pendidikan, dan sifat George W. Bush sebagai seorang penentu keputusan yang mudah dikendalikan oleh situasi pasca peristiwa 11 September. Selain itu, bukti yang menunjukkan bahwa George W. Bush merupakan kultur dominan budaya strategis dari kebijakan Pro

Israel adalah keberlangsungan kebijakan tersebut yang masih dinamis pada masa pemerintahan presiden Barrack Obama. Kelima pengaruh tersebut menjadikan isu memerangi terorisme dari fundamentalis Islam sebagai agenda utama dalam pemerintahan George W. Bush, perak Irak dan Afghanistan merupakan buktinya. Agenda utama tersebut yang dikenal dengan nama “*War on Terrorism*” sekaligus mendorong George W. Bush untuk mengedarkan Keputusan resmi Presiden tahun 2002 yang dalam unit III disebutkan adanya dukungan terhadap Israel.

Keberlanjutan kebijakan Pro Israel yang sekaligus dinyatakan George W. Bush dalam unit III keputusan resmi Presiden tahun 2002 merupakan bukti bahwa seorang individu dapat menjadi *descision maker* atau pembuat keputusan. Meskipun demikian peneliti menyimpulkan bahwa secara hukum, kedudukan George W. Bush sebagai badan eksekutif tidak sah untuk mengatur proses pembuatan kebijakan luar negeri. Sebagai seorang pembuat keputusan, George W. Bush dipengaruhi oleh berbagai macam elemen. Elemen otoritas penasihat badan eksekutif, pengaruh peristiwa internasional dalam interpretasi kondisi domestik negara, dan kedekatan terhadap komunitas Yahudi. Seluruhnya merupakan pengaruh yang melingkupi George W. Bush dan membentuk karakternya sebagai seorang individu yang dominan dalam peningkatan intensitas kebijakan Pro Israel. Perubahan orientasi “kebebasan” dalam jargon politiknya tidak hanya dipandang sebagai bentuk sikap “tergesa - gesa” George W. Bush, namun sekaligus menjadi indikator bahwa kebijakan Pro Israel akan tetap dilanjutkan tanpa harus terpengaruh oleh peristiwa 11 September.

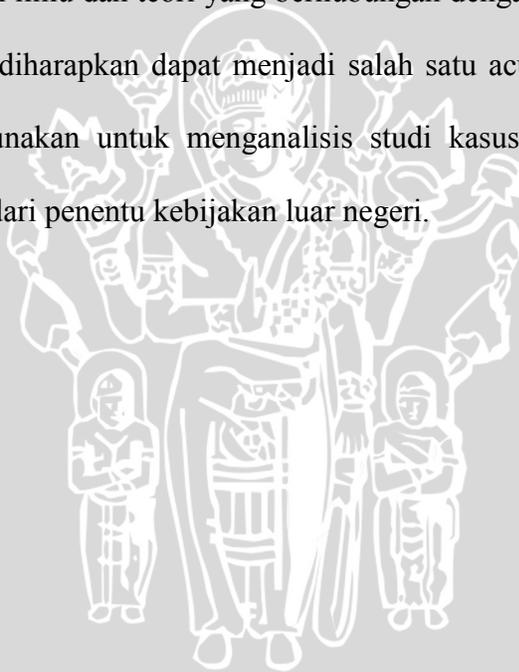
5.2 Saran

Salah satu kelemahan dari penelitian ini adalah elaborasi antara level individu dengan Teori Budaya Strategis yang rapuh. Peran George W. Bush sebagai badan eksekutif di dalam sistem konstitusi Amerika Serikat yang terlegitimasi diketahui tidak sah untuk terlibat langsung di dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, dalam hal ini kebijakan Pro Israel. Peneliti menyarankan bagi calon peneliti lain yang berencana untuk melaksanakan penelitian dengan unit analisis yang sama untuk dapat membuktikan bahwa seorang atau sekelompok aktor memiliki pengaruh signifikan dan terlegitimasi dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.

Level analisis individu merupakan level analisis yang paling minor. Kelemahan dari penggunaan level tersebut adalah pada tingginya tingkat intersubyektifitas dari data – data yang berkenaan langsung dengan subyek yang diteliti. Untuk mengukur seorang individu berdasarkan tindakan, watak, kepercayaan, dan perilaku dibutuhkan data yang obyektif. Permasalahan yang dihadapi oleh peneliti dalam skripsi ini adalah eksistensi peristiwa 11 September, baik dari segi pelaku hingga akibatnya yang masih diperdebatkan dalam dunia akademis sehingga masih banyak data dan sumber referensi yang cenderung bersifat kurang akademis. Peneliti dituntut untuk cermat dan sering melaksanakan *cross check* data untuk memastikan bahwa sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu calon peneliti yang berencana untuk menggunakan peristiwa 11 September diharapkan

untuk dapat memberikan tingkat anomali yang membuat sebuah penelitian dirasa perlu untuk dilaksanakan.

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu contoh alternatif penelitian yang berhubungan dengan ruang lingkup kebudayaan dalam Hubungan Internasional. Adanya elemen persepsi terhadap peristiwa 11 September yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat merupakan salah satu indikator analisis yang membutuhkan penerapan ilmu dan teori yang berhubungan dengan studi kebudayaan. Teori Budaya Strategis diharapkan dapat menjadi salah satu acuan teori bagi calon peneliti lain, yang digunakan untuk menganalisis studi kasus yang berhubungan dengan kultur dominan dari penentu kebijakan luar negeri.



DAFTAR PUSTAKA

Ackermann. 2012. *Getting Started With Cognitive Mapping* (www.banxia.com) diunduh pada tanggal 23 Juli 2012

Anonim. 2004. *President George W. Bush A Friend of American Jewish Community*. New York: (www.hinari.org) diunduh pada tanggal 2 April 2012

Berkowitz, Peter dalam Shain, Yossi. 2005. *Bush's Foreign Policy & Neo-Conservative Ideology After September 11*. London: Harold Hartog School of Government and Policy

Bradley, Richard, dkk. 2011. *Aggregating Causal Judgment*. London: Journal of Theoretical Politics Volume 19. 2011

Budiardjo, Miriam Prof. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Bush, George W. 2002. *The National Security Strategy of the United States of America*. Gedung Putih, Washington: [Keputusan Resmi Presiden]

Cakmak, Cenap. *American Foreign Policy and September 11*. London: Jstor Journal

Colin Powell . 2012. *The Unauthorized Biography* (www.biography.com), diunduh pada tanggal 10 April 12

DeJarnette, Larry N. 2005. *Pro Israel Interest Groups And The Formulation of US Foreign Policy For Midle East*. Port Royal: National Technical Information Service

- Djelantik, Sukawarsini. 2010. *Terorisme: Tinjauan Psiko Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Elliot Abrams. 2012. *The Unauthorized Biography* (www.biography.com) diunduh pada tanggal 5 April 12
- Fong T, Loos R. 2007. *Balancing act: Bush budget reveals healthcare funding priorities* (www.ebscohost.com) diunduh pada tanggal 29 April 2012.
- George W. Bush. 2012. *The Unauthorized Biography* (www.biography.com) diunduh pada tanggal 12 Maret 2012
- International Council on Human Rights Policy. 2002 *Human Rights After September 11*. Swiss: International Council on Human Rights
- Johari, J.C. 1987. *Contemporary Political Theory (Revised And Enlarged Edition)*. New Delhi: Sterling Publishers
- Johnston, Alastair. 1995. *Thinking About Strategic Culture* (International Security vol. 19 no. 4 Spring 1995 32-64). Jstor Journal
- Lantiss, Jeffrey S. 2006. *Strategic Culture From Clausewitz to Constructivism*. Jstor Journal chapter 3
- Lenzowski, George. 1956. *The Middle East In World Affairs*. London: Cornell University Press
- Mahnken, G. Thomas, 2006. *United States Strategic Cultures*. US Government Agency: SAIC
- Mark, R. Clyde. 2002. *Almanac of Policy Issues*. Congressional research Service (www.policyalmanac.or) Diakses tanggal 20 November 2011

Marsh, David dan Stoker, Gerry. 2010. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Dua

Martin, G. Lenore. 2003. *Asserting the Impact of US – Israeli Relations on the Arab World*. Strategic Studies Institute

Mas'ood, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES

Obama, Barrack. 2009. *Remarks by President On A New Strategy for Afghanistan and Pakistan*. Washington: Gedung Putih

Pfiffner, James P. 2003. *George W. Bush: Policy, Politics, Personality*. New York: George Mason University Press

Pfiffner, James P. 2009. *George W. Bush as Chief Executive*. London: Edinburgh University Press

Rynhold, Jonathan. 2008. *President Obama And The Middle East Challenge*. New York: BESA Centre Perspective Papers no. 50, November 2008. (www.biu.ac.il) diunduh tanggal 7 Mei 2012

Sharp, M. Jeremy. 2010. *U.S Forreign Aid To Israel*. New York: Congressional Research Service

Shlaim, Avi. *The US and the Israeli – Palestinian Conflict* dalam Dunne, Tim dan Booth Ken. 2002. *Worlds in Collision: Terror and the Future of World Order*. London: Palgrave Macmillan

Tarpley, G. Webster dan Chaitkin, Anton. 1998. *George Bush: The Unauthorized Biography*

The New York Times. 2004. *General Election of the United States*. (www.cwfa.org) diunduh pada tanggal 9 April 2012

Tibi, Bassam. 2000. *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*. Jogjakarta: Tiara Wacana Yogya

Traub, James. 2009. *The New Israel Lobby*. New York: New York Times edisi September 2009. (www.nytimes.com) diunduh pada tanggal 24 Mei 2012





Lampiran



Lampiran 1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK

P.S HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jl. Veteran Malang (65145)

Telp. (0341) 575755,551611 Psw. 250, Fax (0341) 570051

<http://www.Fisip.brawijaya.ac.id>

E-mail: fisip.ub.ac.id

LEMBAR MONITORING

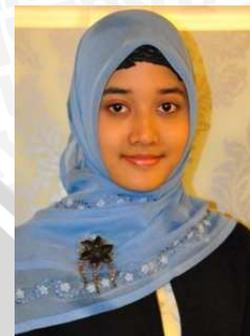
KEGIATAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

NO	HARI	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TTD PEMBIMBING
1	Rabu	30 November 2011	Konsultasi bab 1 & 2 draft awal proposal skripsi.	<i>[Signature]</i>
2	Rabu	7 Desember 2011	Konsultasi bab 1 & 2 Konsultasi proposal skripsi II	<i>[Signature]</i>
3	Selasa		proposal & sistematika Bab 4.	<i>[Signature]</i>
4	Kamis	9 Feb. 2012	Revisi proposal & pemecahan masalah & hipotesis	<i>[Signature]</i>
5	Kamis		Revisi proposal.	<i>[Signature]</i>
6	Senin	02 / 09 / 12	acc proposal sampul	<i>[Signature]</i>

7	12 April 2012	Rabu	Konsultasi pasca ACC revisi sempur	Jlilin
8	24 April 2012	Selasa	ACC. menzergnkan Bab IV	Jlilin
9	22. Mei 2012.	Selasa.	ACC. Finishing Bab & persiapan ujian	Jlilin
10	31 Mei 2012.	Kamis	ACC ujian pendadaran	Jlilin
11	25 Juli 2012	Kamis	acc Revisi Nasabah. revisi penelitian.	ad.
12				
13				
14				

CURRICULUM VITA

	
Nama	Raissa Ardianti
Tempat, Tanggal lahir	Malang, 25 Maret 1990
Jenis Kelamin	Perempuan
Status	Belum Menikah
Agama	Islam
Alamat	Jl. Barito nomor 6, RT 06 RW 01, Malang, Jawa Timur 65123
No Telp./HP	(0341) 470131 / 081 94491 3464
Email	ahmadisaddam@hotmail.com
Fakultas	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Program Studi	Hubungan Internasional		
Peminatan	Social And Cultural Development		
Alamat Universitas	Jl. Veteran Malang 65145, Jawa Timur		
PENDIDIKAN			
Nama Sekolah	Tempat	Tahun	Hasil
TK Indria Rini	Malang	1994-1996	Lulus
SDN Bunulrejo VII	Malang	1996-2002	Lulus
SMP Negeri 8 Malang	Malang	2002-2005	Lulus
SMA Negeri 5 Malang	Malang	2005-2008	Lulus
Universitas Brawijaya	Malang	2008-2012	Lulus
KURSUS DAN PELATIHAN			
No	Kursus/Pelatihan	Tempat	Tahun
1.	Kuliah Umum “Multiperspektif Persoalan Migrasi Global”	Laboratorium Universitas Brawijaya Malang	2012
2	Debat Nasional Hukum Humaniter Internasional Palang Merah Internasional	Universitas Gajahmada, Jogjakarta	2011
3	Short Diplomatic Course Sidang Dewan Keamanan PBB yang diselenggarakan oleh Program Studi Hubungan Internasional	Hotel Kartika Graha Malang	2010

	dan Kemenlu RI		
4	Simposium “Nuklir Iran dalam Konstelasi Politik Internasional” yang diselenggarakan oleh Program Studi Hubungan Internasional dan Kemenlu RI	Universitas Brawijaya	2010
5	Debat Nasional Hukum Humaniter Internasional Palang Merah Internasional	Universitas Gajahmada, Jogjakarta	2009
6	Seminar “Global Economic Crisis: Developing Countries’ Perspectives”	Universitas Brawijaya	2009
7	Diskusi Mahasiswa Hubungan Internasional Regional Jawa Timur	Universitas Muhammadiyah Malang	2009
8	Pelatihan Broadcasting	Radio Chakrabuwana Malang	2008
PENGALAMAN ORGANISASI			
No	Organisasi	Tempat	Tahun
1	Asisten Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Brawijaya periode tahun 2011-2012	FISIP, Universitas Brawijaya Malang	2012

2	Divisi Eksternal Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya	Universitas Brawijaya	2010
PENGALAMAN KEPANITIAAN			
1.	Tutor dalam “Workshop Praktik Kerja Nyata & Networking Skill” tanggal 17 dan 24 Maret 2012	Universitas Brawijaya	2012
2	Master of Ceremony Seminar “Global Economic Crisis Developing Countries’s Perspectives”	Universitas Brawijaya	2009
PUBLIKASI			
No	Karya	Tempat	Tahun
1	Menerbitkan buku berjudul “Galaubalisasi: Pandangan Mahasiswa Terhadap Isu – Isu Masa Kini” dengan nomor ISBN 978-602-9415-2	Kota Malang	2012
2	Membudayakan Kultur Humanisme Kaum Muda Sebagai Agen Pemberantas Kelaparan dan Gizi Buruk di Indonesia.	World Food Programme Indonesia	2011

KEMAMPUAN KOMPUTER			
Microsoft word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, Adobe Photoshop, Coreldraw, Internet.			

